



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

MATERI PENGANTAR SOAL

**Pengantar Soal Perkembangan Politik Luar Negeri
Terutama Kerjasama Negara-Negara ASEAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya semata, maka materi Pengantar Soal Perkembangan Politik Luar Negeri Terutama Kerjasama Negara-Negara ASEAN ini dapat terselesaikan dengan baik. Materi ini disusun dengan tujuan untuk menjadi bahan ajar bagi para PNS yang hendak mengambil ujian dinas dalam rangka kenaikan jabatan yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Promosi kenaikan pangkat didasarkan pada kemampuan, senioritas, ujian, wawancara, dan gabungan beberapa faktor. Promosi kenaikan pangkat dilakukan tidak saja untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan, namun juga meningkatkan kinerja PNS. Materi pengantar soal ini disusun khusus untuk memfasilitasi terselenggaranya Ujian Dinas Tingkat I dan II dalam rangka kenaikan jabatan tersebut.

Atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun materi pengantar soal ini. Begitu pula halnya dengan instansi dan narasumber yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terima kasih atas masukan dan informasi yang diberikan. Kami sangat menyadari bahwa materi pengantar soal ini masih jauh dari sempurna, sehingga setiap masukan dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan dalam pembuatan materi pengantar soal selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia	2
C. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Ir. Soekarno	5
D. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Soeharto	10
E. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie	16
F. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)	20
G. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri	22
H. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Sby)	24
I. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)	34
BAB 2 KERJASAMA INDONESIA DAN ASEAN	47
A. Hubungan Indonesia-Malaysia	49
B. Hubungan Indonesia-Singapura	53
C. Hubungan Indonesia-Filipina	55
D. Hubungan Indonesia-Thailand	58
E. Hubungan Indonesia-Brunai Darussalam	59
F. Hubungan Indonesia-Kamboja	60
G. Hubungan Indonesia-Laos dan Vietnam	60
H. Hubungan Indonesia-Myanmar	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik luar negeri adalah Kebijakan suatu negara berdaulat untuk melakukan hubungan dengan negara lain serta dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri. Politik luar negeri suatu negara cenderung bersifat tetap dan juga merupakan sebuah pola perilaku suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain ataupun hubungan internasional. Didalam sebuah kebijakan luar negeri suatu negara terdapat strategi dan taktik yang digunakan dalam berhubungan dengan negara lain guna memperjuangkan tujuan nasionalnya. Tujuan nasional suatu negara merupakan gambaran dari kepentingan domestik negara tersebut yang dikemas dalam bentuk politik luar negeri. Dengan kata lain dalam mencapai tujuan nasionalnya suatu negara harus melakukan hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah aktifitas internasional yang dilakukan oleh negara berdaulat untuk mencapai tujuan nasionalnya. Didalam tujuan nasional terdapat kepentingan domestik yang berusaha diangkat keluar untuk diperjuangkan sehingga kepentingan tersebut dapat dicapai. Setiap negara yang berdaulat memiliki politik luar negerinya masing-masing yang tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan hubungan antar negara guna mendapatkan kepentingan nasionalnya.

Politik luar negeri merupakan rangkaian kebijakan otoritatif dari suatu negara terhadap dunia luar, dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Politik luar negeri menggambarkan suatu tindakan negara yang mengarah pada situasi tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi, ruang dan waktu, baik dipengaruhi oleh kondisi domestik maupun kondisi internasional. Politik (kebijakan) luar negeri adalah strategi yang dirumuskan oleh elit politik suatu negara

dalam hubungannya dengan negara lain untuk memperoleh, memperjuangkan, dan mempertahankan kepentingan nasionalnya (national interest) melalui jalan (instrumen) diplomasi ataupun perang (Suhanto, 2011).

Gambaran politik luar negeri Indonesia menurut Rajesh Kumar (1997) adalah sebagai berikut Prinsip dasar politik luar negeri Indonesia didefinisikan secara luas sebagai “partisipasi aktif dan mandiri dari kepentingan nasional Indonesia” yang secara spesifik termanifestasi dalam pendirian “politik non-blok”-nya. Implementasi dari prinsip-prinsip tersebut berubah seiring berjalannya waktu, sebagian sebagai refleksi dari pergantian lingkungan eksternal dan sebagian lagi sebagai reaksi dari pergantian kebutuhan domestik. Jack C Plano (1969) berpendapat bahwa Setiap negara, dalam entitasnya, menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional.

Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional. Setiap keberadaan suatu negara pastinya merancang suatu kebijakan yang bersumber pada kepentingan nasionalnya serta sebagai acuan dalam menetapkan diri di dalam masalah / isu-isu internasional yang lebih baik dibicarakan bersama agar lebih mudah diselesaikan bersama-sama negara lainnya sebagai bentuk keterlibatan suatu negara didalam suatu masalah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan negara tersebut bukan hanya untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya saja akan tetapi sebagai ketegasan posisi suatu negara dalam menghadapi permasalahan internasional.

B. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Entitas terbentuknya negara terdiri dari beberapa karakteristik yang fundamental. Karakteristik tersebut antara lain memiliki wilayah, pemerintahan yang berdaulat, warganegara, dan aturan hukum. Dalam

pemerintahan yang sosial demokratis sepertihalnya Indonesia, aturan-aturan hukum harus berdasarkan cita-cita kerakyatan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini juga berlaku pada perumusan politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia berpedoman pada landasan idiil berupa Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan operasional dapat bervariasi sesuai dengan kepentingan nasional periode pemerintahan yang sedang berkuasa. Seperti Undang-undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Keputusan Presiden nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di luar negeri, Keputusan Menteri Luar Negeri nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan idiil Pancasila, mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memberikan garis-garis besar mengarahkan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, kepentingan nasional Indonesia secara eksplisit termuat dalam pasal-pasal UUD 1945. Pancasila sebagai landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia menjadi salah satu variabel yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila Pancasila adalah pedoman dasar pelaksanaan kehidupan bernegara dan bangsa yang ideal. Sehingga politik luar negeri sekurang-kurangnya merupakan cermin dari Pancasila. Kedua landasan ini, bersifat permanen tidak dapat digantikan. Adapun pengalaman sejarah menyebabkan UUD 1945 tergantikan oleh UUDS 1950 adalah lebih merupakan suatu pergeseran ideologi dan cita-cita Indonesia yang saat itu berada di tengah-tengah blok Timur-Barat. Pada saat itu, Indonesia sulit mempertahankan sikap yang selamanya netral melalui *nonalignment movements* (Gerakan Non-blok).

Landasan operasional Indonesia bervariasi sesuai dengan kepentingan nasional periode pemerintahan saat itu. Misalnya,

kepentingan nasional Indonesia pada Orde Lama dapat amati dari konteks pidato-pidato Presiden Sukarno, yang tertuang dalam Maklumat Politik. Yang antara lain berbunyi, menjunjung kehidupan bernegara yang damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, bertetangga dan bekerja sama di segala bidang, serta politik ala piagam PBB. Namun, politik luar negeri yang demikian tidaklah benar-benar solid disebabkan perkembangan hubungan internasional, terutama kawasan, yang kontroversional dengan idealisme Indonesia. Pada masa konflik kembalinya kolonialisme ke Indonesia, Presiden Sukarno menegaskan arah politik luar negerinya ke dalam Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia, yakni mengabdikan untuk kemerdekaan nasional, perjuangan kemerdekaan, dan pembelaan perdamaian. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, politik Indonesia bersifat bebas aktif, yang tidak lain merupakan pelurusan prinsip tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pada masa kepresidenan BJ Habibie, meskipun arah politik Indonesia masih memegang prinsip bebas aktif, namun utamanya menekankan pada prinsip peningkatan kemandirian bangsa.

Sebagaimana telah diungkapkan di awal tulisan ini, politik luar negeri Indonesia adalah transformasi kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional bersifat fluktuatif dan dinamis sebagai respon terhadap peristiwa penting dunia. Salah satu peristiwa yang paling momentum adalah kehadiran perang dingin. Namun demikian, saat itu arah politik Indonesia adalah netral dan tidak berusaha membentuk blok ketiga yang ideologinya berlawanan dengan dua blok raksasa Amerika-Uni Soviet. Hal ini sesuai dengan penjelasan Moh. Hatta di depan sidang KNIP. Beliau menyatakan politik Indonesia tidak dapat diarahkan oleh blok manapun yang membawa kepentingan nasional masing-masing. Sebaliknya, arah politik luar negeri Indonesia merupakan sinergisitas kepentingan nasional, tujuan nasional dan konfigurasi geopolitik, dan sejarah nasionalnya yang rentan oleh faktor internal dan eksternal. Rosenau dan Roeslan Abdulgani, sepakat bahwa politik yang demikian itu

adalah merupakan turunan dari politik dalam negeri. Sehingga politik luar negeri merupakan perpanjangan kepentingan nasional domestik dan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, manakala kepentingan dalam negeri mengalami pergeseran, tidak menutup kemungkinan arah politik luar negeri akan selamanya bersifat statis. Hanya saja beberapa nilai mengalami adaptasi.

Faktor internal dan eksternal mempengaruhi karakteristik politik luar negeri pada setiap periode pemerintahan. Presiden Soeharto, mewarisi pengalaman domestik akibat kebobrokan ekonomi, disintegrasi, dan kudeta politik sehingga politik luar negeri Indonesia ketika itu lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan kepemimpinan politik. Berbeda sekali dengan masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Politik luar negeri pada masa pemerintahan beliau, lebih terfokus pada pemulihan nama baik Indonesia serta peningkatan peran diplomasi Indonesia di organisasi Internasional mengenai berbagai isu-isu internasional sekaligus perbaikan mutu birokrasi. Sehingga peran presiden dalam diplomasi politik menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia.

C. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Ir. Soekarno

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno yang didampingi oleh Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Pada masa awal-awal kemerdekaan, arah kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia lebih ditujukan untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi dan menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia (Wuryandari, 2008). Agenda politik luar negeri Indonesia pada saat itu lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik domestik, daripada semata-mata mengikuti tekanan lingkungan internasional (Wuryandari, 2008). Hal ini dikarenakan

Indonesia adalah sebuah negara yang baru merdeka yang belum secara penuh mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara di dunia. Sedangkan syarat suatu negara diakui sebagai suatu negara yang berdaulat penuh adalah mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia bahwa negara tersebut adalah sebuah negara baru yang telah merdeka dan berdaulat.

Orientasi kebijakan Indonesia pada saat itu adalah mempertahankan kedaulatan dan membentuk otoritas negara itu sendiri, sambil menata kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Soekarno sebagai aktor sentral (dalam hal ini berperan sebagai seorang presiden) berusaha memainkan peranannya sebagai seorang nasionalis sejati yang mempertahankan keutuhan bangsa dan negaranya. Sejak Bung Hatta menyampaikan pidatonya berjudul "Mendajung Antara Dua Karang" (1948), Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional.

Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh Pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahkan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa (Jusuf, 1989). Politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga disesuaikan dengan konstelasi politik internasional pada saat itu.

Pada masa Soekarno (1945-1965), politik luar negeri Indonesia bersifat *high profile*, flamboyan dan heroik, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. Dengan nilai

ingin menyejahterakan bangsa, Soekarno lebih memilih gaya politik revolusioner (domestik maupun luar negeri) (Wuryandari, 2008). Presiden Soekarno pada masa itu diasosiasikan dengan kelompok negara-negara komunis. Kedekatannya dengan para pemimpin negara komunis menyebabkan kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannya terkesan mendekati garis kiri dan Indonesia dikenal sebagai negara yang bersahabat dengan negara-negara komunis. Soekarno punya agenda politik luas yang mencakup gagasan-gagasan kiri. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno telah membawa Indonesia pada aliran arah kiri dengan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Pyongyang-Peking yang beliau buat. Poros ini kemudian menempatkan Indonesia pada posisi yang aneh di kalangan negara-negara Barat. Puncaknya adalah keluarnya Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, Soekarno sendiri menyatakan bahwa dirinya bukan seorang komunis.

Kedekatan Indonesia dengan negara-negara komunis pada saat itu ternyata mempengaruhi agresivitas politik luar negeri Indonesia. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor determinan yang mempengaruhi pola pembentukan kebijakan pelaksanaan politik luar negeri. Faktor pertama, kondisi politik dalam negeri pasca proklamasi masih kurang stabil dan diwarnai pertentangan basis pencarian dan pemilihan ideologi negara. Faktor kedua, kondisi ekonomi Indonesia yang sangat kacau dan terpuruk, di antaranya ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi bahkan hingga mencapai 600%. Faktor ketiga, pengambilan keputusan pada saat itu bersifat sangat sentral dan sangat terpaku pada sosok kharismatik Soekarno. Soekarno menjadi tokoh andalan Indonesia dalam forum internasional, bahkan karena hal tersebut, Soekarno juga dinobatkan sebagai “Presiden Seumur Hidup” oleh rakyat Indonesia. Sentralisasi peran Soekarno ini juga yang akhirnya mendorong beliau melakukan pendekatan-pendekatan “terpimpin” hingga akhirnya terbentuk Demokrasi Terpimpin Pancasila yang menggantikan Demokrasi Parlementer RIS.

Faktor keempat, lingkungan internasional pada saat itu berada pada masa Perang Dingin, di mana dunia terbagi menjadi dua kekuatan besar, yaitu blok barat dan blok timur. Kepentingan Indonesia sendiri adalah dalam rangka menjaga dan memelihara integritas politik bangsa Indonesia yang baru merdeka sebagai fondasi bagi *nation-building* dan *state-building*. Di sinilah Indonesia menentukan posisinya dalam kerangka Politik Luar Negeri Bebas-Aktif.

Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Meja Bundar, Konferensi Asia Afrika, Konferensi Irian barat dan Malaysia, dan politik poros-porosan Jakarta-Peking-Hanoi-Phnom Penh-Pyong Yang (Wuryandari, 2008). Kepentingan nasional yang paling utama ketika itu tidak lain adalah untuk memperoleh pengakuan internasional atas kedaulatan negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada Agustus 1945 (Wuryandari, 2008). Konferensi dan kebijakan tersebut merupakan wujud usaha yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Namun, ada yang menilai bahwa konferensi dan kebijakan tersebut tidak murni untuk mencari dan mendapatkan pengakuan dari negara lain, tetapi juga memperlihatkan bahwa politik luar negeri Indonesia masih rapuh. Pemimpin-pemimpin Indonesia belum memberikan perhatian besar pada politik luar negeri. Pada waktu kemerdekaan bangsa diproklamirkan, politik luar negeri merupakan suatu wilayah diskursus yang banyak dikenal, yang oleh Rosihan Anwar diistilahkan dengan sebutan “*terra incognita*” (Wuryandari, 2008).

Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Non-Blok (*Non-Aligned Movement / NAM*). Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni blok

barat (Amerika) dan blok timur (Uni Soviet). Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajah. Selain itu pada masa ini, konsep politik luar negeri Indonesia cenderung berlawanan dengan konsep hegemoni negara-negara barat dalam bentuk kebijakan-kebijakan luar negeri negara-negara tersebut, khususnya negara-negara besar.

Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pascakemerdekaan hingga tahun 1950an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya (Wuryandari, 2008). Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia.

Berkaitan dengan penggunaan instrumen politik luar negeri, instrumen politik luar negeri yang dominan digunakan pada masa pemerintahan Soekarno adalah diplomasi. Diplomasi ditempuh untuk memuluskan jalan Indonesia dalam mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia akan kemerdekaannya. Selain itu, diplomasi juga dominan dipilih karena sesuai dengan konteks pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berprinsip bebas aktif. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa cita-cita bangsa tidak mungkin dicapai tanpa diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional (Wuryandari, 2008).

Strategi ganda Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negerinya pada masa revolusi di atas pada tingkatan tertentu menunjukkan ambivalensi. Pada satu sisi, pendekatan pertama melalui perjuangan fisik di atas jelas menunjukkan optimisme dan kepercayaan yang tinggi dari Indonesia bahwa Indonesia dengan kemampuannya

sendiri bisa melawan kekuatan asing, khususnya dengan Belanda yang secara militer lebih kuat. Pada sisi lain, pendekatan yang juga menekankan pada diplomasi menggunakan bantuan pihak ketiga juga menunjukkan sisi lemah dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Wuryandari, 2008).

D. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Soeharto

Setelah Presiden Soekarno lengser dari kursi pemerintahan, Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Presiden Soeharto adalah presiden yang paling lama berkuasa dan memerintah di Indonesia, yakni selama kurang lebih 32 tahun. Masa kepemimpinan Soeharto disebut era Orde Baru. Era orde baru (Orba) merupakan era yang identik dengan kepemimpinan Soeharto, yaitu ketika Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia mulai tanggal 12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998 (Wuryandari, 2008).

Masa orde baru merupakan salah satu bentuk peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Orde baru merupakan sebutan pemisah bagi rezim yang berkuasa pada saat itu. Setelah lengsernya Soekarno pada tahun 1960an, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia, yang mana pada masa orde lama terjalin hubungan diplomatik yang kurang baik dengan beberapa negara karena karakter pemimpin dan bangsa begitu kuat dalam pandangan Internasional, apalagi dengan faktor *power shift* pasca Perang Dingin yang menjadikan politik di masa itu sangat kuat dan tegas ketika berhadapan dengan dunia luar. Dengan menunjukkan *power* sebagai negara yang kuat, hubungan dengan beberapa negara Asia Tenggara kurang baik, padahal kita sebagai bangsa yang berdaulat membutuhkan interaksi dengan dunia luar dalam segala bidang.

Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Keterikatan pada pola-pola ekonomi maupun politik internasional mempunyai signifikansi yang tinggi untuk memahami dinamika internal yang menjadi faktor determinan dalam mempengaruhi polugri pada masa kepemimpinan Soeharto (Wuryandari, 2008). Faktor-faktor politik dan ekonomi yang dianggap paling berpengaruh tersebut adalah kondisi domestik, modalitas, struktur dan proses penentuan politik luar negeri, agenda utama, isu-isu domestik yang dominan dan gaya serta pola kepemimpinan politik (Wuryandari, 2008).

Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik, tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan polugri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan "*good neighbourhood policy*" melalui *Association South East Asian nation* (ASEAN) (Wuryandari, 2008). Titik berat pembangunan jangka panjang kita adalah pembangunan ekonomi, untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, pada dasawarsa abad yang akan datang (Jusuf, 1989). Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan *New Order* (tatanan baru) adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya (Anwar, 2007). Keberhasilannya dalam hal pembangunan ekonomi, Soeharto mendapatkan gelar Bapak Pembangunan bangsa Indonesia dan beberapa penghargaan internasional.

Berikut pernyataan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. "Bagi Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-blok tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif karena politik luar negeri kita tidak

hampa, mati, atau tidak berjalan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas di mana Indonesia bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, politik ataupun secara ideologis bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari berbagai masalah atau peristiwa dengan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun, baik secara militer, politis, ataupun secara ideologis.” (Kumar, 1997).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap soal regionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta bantuan pinjaman. Presiden Soeharto juga selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya tersebut, seperti halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya adalah (Jusuf, 1989):

1. Indonesia segera menghentikan konfrontasi dengan Malaysia

Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif. Konfrontasi berakhir setelah Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menandatangani Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara.

2. Pembentukan ASEAN

Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN pada tanggal 31 Juli 1961. ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerja sama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Ada konvergensi kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu pembangunan ekonomi dan sikap non komunis. Dengan demikian, stabilitas negara-negara anggota ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri sangatlah penting. ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia. Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia coba difasilitasi dan dicarikan solusinya dalam forum regional ini. Pemerintahan Soeharto coba membangun Indonesia sebagai salah satu negara Industri baru di kawasan Asia Tenggara, sehingga pernah disejajarkan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagai macam-macam Asia baru. Di samping itu, politik luar negeri Indonesia dalam forum ASEAN, juga untuk membentuk citra positif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangat layak bagi investasi industri.

3. Konsep ZOPFAN dan SEANWFZ

27 November 1971 di Kuala Lumpur diadakan konferensi para menteri luar negeri ASEAN. Konferensi menghasilkan sebuah konsep yang menghendaki agar kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan damai, bebas, dan netral. Konsep ini diberi nama ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*). Indonesia juga mengenalkan konsep SEANWFZ (*South East Asian Nuclear Weapons Free Zone*) pada tahun 1983 sebagai bagian dari ZOPFAN. Konsep SEANWFZ ini sebenarnya merupakan refleksi dari hasrat Indonesia untuk memainkan peranan yang aktif di panggung regional.

4. Pembentukan AFTA

Pada awalnya, AFTA merupakan usulan dari pihak Thailand. Indonesia awalnya menolak atas ide pembentukan AFTA, namun pada akhirnya Indonesia menyetujuinya. Atas dukungan Indonesia, AFTA kemudian menjadi usulan ASEAN, bukan lagi usulan Thailand. Dengan terbentuknya AFTA, maka kawasan Asia Tenggara mulai memasuki era perdagangan bebas. Bagi Indonesia, terbentuknya ACFTA membentuk peluang untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan tentunya mendukung proses pembangunan nasional.

5. Normalisasi hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat China (RRC)

Hubungan antara Indonesia dengan RRC membeku sejak Oktober 1967, karena RRC diyakini berada di belakang kudeta yang dilakukan oleh PKI pada tahun 1965. Indonesia akan menormalisasi hubungan dengan RRC jika China benar-benar bersahabat dan berhenti memberikan bantuan dan fasilitas terhadap para mantan pimpinan PKI. Pada awal tahun 1989, Indonesia secara tiba-tiba mengumumkan bahwa ada kemungkinan bagi Jakarta dan Beijing untuk membuka kembali hubungan diplomatik. Keputusan normalisasi hubungan Indonesia-China tampaknya memiliki kaitan erat dengan hasrat Presiden Soeharto dalam memainkan peranan dominan dalam politik dunia secara umum dan wilayah Asia Pasifik secara khusus.

6. Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik

Presiden Soeharto memakai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Pada awalnya Indonesia tidak setuju dengan APEC. Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan. Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC dapat mengikis kerja sama antara negara-negara ASEAN. Setelah berakhirnya

Perang Dingin, Indonesia mengubah pandangannya terhadap APEC. Faktor pendorongnya antar lain adalah karena Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya. Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi Ketua GNB X pada tahun 1992, setidaknya memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional.

7. Pasukan Indonesia ke Bosnia

Indonesia melakukan kunjungan dan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Bosnia ketika Yugoslavia pecah dan terjadi kericuhan antara masyarakat Kristen dan Islam di Bosnia. Dalam menghadapi kasus Perang Bosnia, Indonesia lebih menampilkan politik luar negeri yang bijak. Dengan kata lain, Indonesia tidak menampilkan sikap politik yang terlalu berlebihan dalam memandang persoalan internasional. Hal ini tentu menjadi posisi yang tepat dilakukan Indonesia selaku ketua GNB.

8. Pembentukan OPEC

Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam membetuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkan kepentingan nasional, Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC. OPEC menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia.

Pada masa Soeharto, politik luar negeri Indonesia cenderung sangat kooperatif dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara Barat. Konsep kebangsaan atau nasionalitas diidentikkan dengan percepatan pembangunan dengan konsep dan teknik yang diadopsi dari negara-negara luar. Politik luar negeri Indonesia juga masih cenderung patronatif dengan kebijakan dan orientasi ideologi liberal yang diusung dalam globalisasi. Soerharto cenderung tunduk kepada modal asing yang sangat kuat pengaruhnya terhadap pembangunan negara-negara dunia ketiga.

Hal ini yang membuat Indonesia tidak memiliki kedaulatan dan otoritas untuk mengatur bangsa dan negaranya sendiri.

Kepemimpinan Soeharto secara umum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendahulunya. Diparuh pertama kepemimpinannya, dia cenderung adaptif dan *low profile*. Dan pada paruh terakhir kepemimpinannya, sejak 1983, Soeharto mengubah gaya kepemimpinannya menjadi *high profile*. Gayanya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang pada kenyataannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik-ekonomi dan keamanan dalam negeri Indonesia (Wuryandari, 2008). Dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa, Soeharto mengambil gaya represif (di dalam negeri) dan akomodatif (di luar negeri).

Dalam masa kepemimpinan Soeharto, diplomasi masih digunakan sebagai instrumen politik luar negeri yang dominan. Namun, pada masa pemerintahan Soeharto juga diterapkan diplomasi yang bersifat koersif, artinya dalam menerapkan kebijakan Soeharto terkadang menggunakan otoritas penuh yang dimilikinya sebagai Presiden Indonesia dengan sedikit memaksakan kepada seluruh perangkat pelaksana politik luar negerinya (para menteri dan lembaga pemerintahan) dan kepada seluruh rakyatnya.

E. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie

Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Setelah diumumkan pengunduran diri Soeharto tersebut, maka B.J. Habibie secara konstitusional dan secara sah telah menjadi Presiden baru Indonesia menggantikan Soeharto. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie terbilang cukup singkat. Meskipun begitu, bukan berarti selama menjadi Presiden Indonesia beliau tidak melakukan pemerintahan tanpa pencapaian prestasi yang berarti.

Setelah tumbang rezim otoriter Soeharto, Indonesia mencoba menata kembali kehidupan masyarakat dan sistem politik, khususnya politik luar negerinya. Berbagai upaya dilakukan untuk membangun kembali sistem ekonomi yang sempat terpuruk oleh krisis moneter pada akhir 1990-an. Prioritas utama yang dilaksanakan adalah perbaikan ekonomi. Program-program pembangunan ekonomi negara-negara berkembang seperti Millenium Development Goals (MDGs), merupakan gambaran orientasi politik luar negeri Indonesia yang sempat mencari bentuk pasca kejatuhan Soeharto. Namun, dalam perjalanannya program MDGs ini tidak berjalan dengan baik. Politik luar negeri yang pada awalnya ditunjukkan untuk memaksimalkan kepentingan nasional masyarakat sendiri, justru hanya menjadi alat bagi korporasi internasional untuk memasukkan kepentingannya di Indonesia.

Di tingkatan global, Indonesia juga semakin serius dalam mengusahakan perdamaian dunia yang diwujudkan dalam kesepakatan internasional, seperti Protokol Kyoto, penempatan pasukan perdamaian di daerah konflik, hingga usaha penanganan terorisme internasional. Namun, semua hal itu belum merefleksikan kondisi sebenarnya dari masyarakat Indonesia yang semakin hari, semakin tidak mandiri terhadap kedaulatan bangsa dan negaranya. Pada awal masa pemerintahannya Habibie memang menghadapi persoalan legitimasi cukup serius (Anwar, 1998). Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden RI ke-3 memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat (Mustopo, 2007). Meskipun mendapatkan cobaan dari dalam negeri, Habibie masih tetap berusaha mendapatkan dukungan internasional melalui beragam cara. Diantaranya, pemerintahan Habibie menghasilkan dua Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, pemerintahan Habibie pun berhasil mendorong ratifikasi empat konvensi internasional dalam masalah hak-hak pekerja. Pembentukan Komnas Perempuan juga dilakukan pada masa pemerintahan Habibie yang pendek tersebut. Dengan catatan positif atas

beberapa kebijakan dalam bidang HAM yang menjadi perhatian masyarakat internasional ini, Habibie berhasil memperoleh legitimasi yang lebih besar dari masyarakat internasional untuk mengkompensasi minimnya legitimasi dari kalangan domestik.

Habibie mendapatkan kembali kepercayaan dari dua institusi penting yaitu Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (*World Bank*). Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun basis legitimasi dari kalangan domestik tidak terlampaui kuat, dukungan internasional yang diperoleh melalui serangkaian kebijakan untuk membentuk *image* positif kepada dunia internasional memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan pemerintahan Habibie saat periode transisi menuju demokrasi. Pemerintahan Habibie pula yang memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan luar negeri, sebaliknya, juga dapat memberi dampak negatif bagi kelangsungan pemerintahan transisi. Kebijakan Habibie dalam persoalan Timor-Timur menunjukkan hal ini dengan sangat jelas. Habibie mengeluarkan pernyataan pertama mengenai isu Timor-Timur pada bulan Juni 1998 dimana ia mengajukan tawaran untuk pemberlakuan otonomi seluas-luasnya untuk provinsi Timor Timur. Proposal ini, oleh masyarakat internasional, dilihat sebagai pendekatan baru. Di akhir 1998, Habibie mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih radikal dengan menyatakan bahwa Indonesia akan memberi opsi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timor-Timur.

Aksi kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah referendum kemudian memojokkan pemerintahan Habibie. Legitimasi domestiknya semakin tergerus karena beberapa hal. Pertama, Habibie dianggap tidak mempunyai hak konstitusional untuk memberi opsi referendum di Timor-Timur karena ia dianggap sebagai presiden transisional. Kedua, kebijakan Habibie dalam isu Timor-Timur merusak hubungan antara dirinya dengan Jenderal Wiranto, panglima TNI pada masa itu. Habibie menjadi kehilangan legitimasi, baik dimata masyarakat internasional maupun domestik. Di mata internasional, ia dinilai gagal mengontrol TNI, yang

dalam pernyataan-pernyataannya mendukung langkah presiden Habibie menawarkan referendum, namun di lapangan mendukung milisi pro integrasi yang berujung pada tindakan kekerasan di Timor Timur setelah referendum. Di mata publik domestik, Habibie juga harus menghadapi sentimen nasionalis yang semakin menguat, terutama ketika akhirnya pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin oleh Australia masuk ke Timor-Timur. Sebagai akibatnya, peluang Habibie untuk memenangi pemilihan presiden pada bulan September 1999 hilang. Sebaliknya, citra TNI sebagai penjaga kedaulatan teritorial kembali menguat. Padahal sebelumnya, peran politik TNI menjadi sasaran kritik kekuatan pro demokrasi segera setelah jatuhnya Suharto pada bulan Mei 1998.

Sejak 1998 Indonesia mengalami keterpurukan yang luar biasa dalam berbagai dimensi, serta menjadi penyebab bangsa Indonesia terpuruk pula dalam konstelasi politik internasional. Lepasnya Timor-Timur, kekalahan diplomasi Sipadan dan Ligitan, serta “hilangnya” wibawa Indonesia di mata negara-negara tetangga (seperti Australia, Singapura, dan Malaysia) merupakan beberapa persoalan yang sempat dihadapi bangsa Indonesia, di tengah krisis ekonomi (sebagai imbas krisis moneter Asia tahun 1997) dan carut-marut politik di era reformasi (Wuryandari, 2008). Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh Presiden Habibie adalah dibangunnya Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan nasional. Dengan dibangunnya IPTN ini, dunia bidang teknologi terutama dalam bidang teknologi, khususnya teknologi penerbangan.

Instrumen politik luar negeri yang digunakan pada masa pemerintahan Presiden Habibie adalah diplomasi. Di era Habibie, kepentingan nasional dalam dunia diplomasi lebih merujuk ke upaya pemulihan ekonomi (Wuryandari, 2008). Diplomasi juga digunakan oleh Habibie guna menarik perhatian dunia internasional dan mendapatkan dukungan internasional untuk mengukuhkan legitimasinya sebagai presiden transisional. Diplomasi juga digunakan oleh Habibie untuk

menarik perhatian publik domestik agar legitimasinya sebagai Presiden diakui.

F. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR berhasil memilih K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Sehari kemudian, Megawati Soekarno putri terpilih sebagai wakil presiden. Dengan terpilihnya duet Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri, maka secara legitimasi formal telah lahir periode baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Era Orde Baru telah dinyatakan berakhir dan digantikan Orde Reformasi (Wuryandari, 2008).

Pemerintahan pasca orde baru tampaknya menuju arah yang acak, karena tak memiliki alur panduan yang memadai, sementara pemerintahannya hanya bertahan dalam waktu yang singkat (Wuryandari, 2008). Ketika Abdurrahman Wahid memimpin Indonesia, politik luar negeri Indonesia cenderung mirip dengan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh Soekarno pada masa orde lama, dimana lebih menekankan pada peningkatan citra Indonesia pada dunia internasional. Pada masa pemerintahannya, politik luar negeri Indonesia menjadi tidak jelas arahnya. Hubungan RI dengan dunia Barat mengalami kemunduran setelah lepasnya Timor-Timur. Salah satu yang paling menonjol adalah memburuknya hubungan antara Indonesia dengan Australia.

Diplomasi di era Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Ancaman

integrasi nasional di era Wahid menjadi kepentingan nasional yang sangat mendesak dan diprioritaskan (Wuryandari, 2008).

Hubungan sipil militer merupakan salah satu isu utama dalam perjalanan transisi menuju demokrasi di Indonesia. Dinamika hubungan sipil militer ini terutama terlihat dalam isu separatisme, baik di Aceh maupun Papua. Isu Timor-Timur seperti diuraikan sebelumnya juga menjadi contoh penting yang memperlihatkan keterkaitan antara faktor domestik (hubungan sipil militer) dan faktor eksternal (diplomasi dan politik luar negeri). Bila dalam periode Habibie terjadi hubungan saling ketergantungan antara pemerintahan Habibie dengan TNI, pada masa Abdurrahman Wahid terjadi *power struggle* yang intensif antara Presiden Wahid dengan TNI sebagai akibat dari usahanya untuk menerapkan kontrol sipil atas militer yang sifatnya subjektif.

Realitas kondisi domestik ini dijadikan dasar kebijakan luar negeri Wahid. Periode pemerintahan Wahid berusaha memperkuat komitmen dunia internasional terhadap Indonesia dengan melakukan perjalanan keliling di 80 negara dalam tempo dua puluh bulan pemerintahannya. Kebijakan yang dikenal sebagai 'diplomasi persatuan' itu dimaksudkan untuk memperoleh dukungan internasional terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang tengah mengalami masalah disintegrasi.

Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selama masa pemerintahannya yang singkat, Abdurrahman Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Namun, sebagian besar kunjungan-kunjungannya itu tidak memiliki agenda yang jelas. Bahkan, dengan alasan yang *absurd*, Wahid berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah rencana yang mendapatkan reaksi keras di dalam negeri. Dan dengan tipe politik luar negeri Indonesia yang seperti ini membuat politik luar negeri Indonesia menjadi tidak fokus yang pada akhirnya hanya membuat berbagai usaha yang telah dijalankan oleh Wahid menjadi sia-sia karena kurang adanya implementasi yang konkrit.

Dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, diplomasi masih menjadi instrumen andalan politik luar negeri Indonesia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, fokus diplomasi Indonesia pada saat itu adalah mengembalikan citra Indonesia di mata internasional.

G. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Megawati dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, seperti nilai tukar rupiah yang agak stabil, tetapi Indonesia pada masa pemerintahannya tetap saja tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lainnya. Belajar dari pemerintahan presiden yang sebelumnya, Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di Tanah Air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat. Dengan kata lain, anggaran presiden ke luar negeri dapat dihemat dan dialokasikan untuk membantu mengurangi penderitaan rakyat di daerah-daerah itu, tanpa harus mengabaikan pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu aspek penting penyelenggaraan pemerintah yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri. Dan yang lebih penting, untuk membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintahan Megawati memiliki *sense of urgency* dan *sense of crisis* yang belum berhasil dibangun pemerintahan sebelumnya.

Pada era Megawati, disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, ada situasi khas era Megawati, yakni serangkaian bom di tanah air. Sehingga dapat dipahami, jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati (Wuryandari,

2008). Pada masa pemerintahan Megawati, banyak persoalan yang harus dihadapi. Salah satu permasalahan yang krusial adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut antara lain :

1. Pemerintahan Soeharto telah mewariskan hutang luar negeri (pemerintah dan swasta) sebesar US \$ 150.80 miliar. Kebijakan Presiden Megawati dalam mengatasi masalah ini adalah meminta penundaan pembayaran hutang sebesar US \$ 5.8 miliar pada pertemuan Paris Club ke-3 tanggal 12 April 2012. Salah satu kebijakan Presiden Megawati yang sangat penting adalah diakhirinya hubungan kerja sama Indonesia dengan IMF.
2. Mampu memperbaiki kinerja ekspor.
3. Ketenangan Megawati disambut baik oleh pasar. Tidak sampai sebulan setelah dilantik, kurs melonjak ke Rp 8.500 per dollar AS. Indeks harga saham gabungan juga terus membaik hingga melejit ke angka 800.
4. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan per kapita. Pada tahun 1997, pendapatan per kapita Indonesia tinggal US \$ 465. Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang dan Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita cukup signifikan, yaitu sekitar US \$ 930.

Megawati tampak tidak berusaha mencitrakan dirinya, tetapi memberikan peran utama kepada Menlu. Megawati mengangkat diplomat karir sebagai Menlu (Hasan Wirayuda) yang kepadanya dunia diplomasi ditumpukan. Dapat dipahami jika berbeda dengan pemerintahan Wahid, gaya dan pola diplomasi era Megawati sifatnya sangat konservatif di tengah kekuatan domestik yang sudah rapuh dan konstelasi politik global yang telah berubah. Akibatnya, Sipadan dan Ligitan lepas dari rengkuhan Indonesia. Megawati mengikuti gaya pendahulunya, Wahid, baik dalam

sikap keras kepala maupun secara intensif melakukan kunjungan ke luar negeri (Wuryandari, 2008).

H. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Sby)

Politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY menepati ASEAN sebagai pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. ASEAN yang menghimpun negara anggota lainnya seperti Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja akan memudahkan Indonesia untuk berhubungan dengan negara – negara di kawasan Asia Tenggara. Hubungan luar negeri Indonesia terhadap negara anggota ASEAN menjadi lebih dekat sehingga tidak menutup kemungkinan akan lebih mudah untuk mencapai kerjasama guna memenuhi tujuan nasional negara. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”* (Pembukaan UUD 1945). Jelas bahwa segala kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan pada tujuan nasional negara, sehingga dengan masuknya Indonesia menjadi anggota ASEAN maka diharapkan akan memudahkan Indonesia dalam mencapai kepentingan serta tujuan nasionalnya.

Presiden SBY selalu mengedepankan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dan dengan cara itu Presiden SBY menyatukannya dengan prinsip konstruktifis. Maksudnya adalah politik luar negeri Indonesia lebih bersifat *“soft diplomacy”* ataupun tindakan–tindakan persuasif dan preventif dibandingkan dengan menggunakan cara *“hard*

diplomacy” yang bagi Indonesia sendiri kurang menguntungkan. Indonesia mengubah cara pandang terhadap negara–negara dikawasan Asia Tenggara secara konstruktif dimana lawan menjadi kawan, dan kawan menjadi mitra strategis Indonesia. Tindakan konfrontasi terhadap Malaysia digantikan dengan kemitraan strategis dengan Indonesia, sehingga Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden SBY bersikap netral dan bersahabat terhadap negara – negara di kawasan Asia Tenggara. Presiden SBY juga menerapkan prinsip “*Thousand Friends, Zero Enemy*”, Indonesia ingin lebih menghimpun persahabatan dengan negara lain dan menghindari segala bentuk permusuhan ataupun konfrontasi. Di dalam ASEAN, Indonesia secara khusus menerapkan prinsip tersebut yang di dorong oleh kepentingan nasional Indonesia.

Pada era kepemimpinan SBY politik luar negeri Indonesia dijalankan dengan berorientasi kepada pembangunan hubungan/komunitas regional yang lebih komprehensif terutama pada ASEAN. ASEAN sebagai pilar utama kerjasama Indonesia dengan negara – negara anggota dan negara non anggota. Dengan merangkul negara – negara anggota ASEAN, Indonesia mengantisipasi tindakan permusuhan antar negara di kawasan Asia Tenggara, dan lebih mengusahakan pelebagaan perdamaian. terkait keamanan kawasan pelebagaan perdamaian tersebut bisa dalam bentuk kerjasama keamanan ataupun “*Security Community*” (Komunitas Keamanan). Menurut Karl Deutsch (1961) mengenai konsep komunitas keamanan, Komunitas keamanan pada ASEAN muncul dengan maksud untuk lebih peduli pada bagaimana cara mengendalikan konflik bukan pada bagaimana menghilangkan perbedaan di antara negara – negara anggota yang secara alamiah selalu memiliki perbedaan visi tentang persoalan yang mereka hadapi bersama. Berbeda dengan aliansi pertahanan ataupun keamanan kolektif, komunitas keamanan ASEAN tumbuh dari kepentingan dan identitas bersama diantara negara – negara anggotanya dan bukan karena adanya musuh bersama dari ASEAN itu sendiri. Komunitas keamanan ASEAN tidak mendukung penggunaan

kekerasan dalam penyelesaian masalah dan menganggap kekerasan sebagai tindakan yang tidak sah (Acharya, 2001). Dengan kata lain komunitas keamanan begitupun ASEAN mengusahakan perdamaian bukan peperangan. Terkait hal tersebut berkenaan dengan politik luar negeri Indonesia yang menyatakan "*Thousand Friends, Zero Enemy*", Indonesia tidak ingin adanya permusuhan melainkan persahabatan antar negara. ASEAN adalah gerbang utama menuju pelembagaan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya perdamaian di kawasan tersebut maka stabilitas keamanan baik regional maupun nasional akan tercapai. Untuk Indonesia sendiri tentu perdamaian sangat menguntungkan sebab tidak ada ancaman yang mengganggu jalannya politik domestik maupun luar negeri Indonesia.

Sejak Orde Baru, Indonesia menempatkan ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri Indonesia. Setidaknya terdapat tiga alasan utama yang mendasari keputusan tersebut. Pertama, Indonesia adalah salah satu pendiri dan pemrakarsa ASEAN sehingga konsekuensi logisnya ASEAN seharusnya menjadi instrumen politik luar negeri Indonesia. Kedua, ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara sehingga Indonesia sudah seharusnya terlibat aktif dalam ASEAN. Ketiga, ASEAN memiliki potensi yang besar untuk terlibat dalam arsitektur dan dinamika di kawasan Asia terutama dibidang politik, ekonomi dan sosial (CSIS, t,t).

Pemerintahan SBY tetap memandang penting posisi ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri Indonesia. Hal ini tersirat jelas dari pernyataan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa dalam pidatonya yang pertama tentang politik luar negeripada pembukaan *Seventh General Conference of the Council for Security Cooperation in theAsia-Pacific* (CSCAP) menyatakan bahwa ASEAN akan tetap menjadi pilar utama dalam politik luar negeri Indonesia serta merupakan memantapkan langkah untuk mencapai *ASEAN Community*. Pernyataan tersebut menandakan bahwa betapa pentingnya ASEAN bagi Indonesia sebagai

pilar utama dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Pada era kepemimpinan Presiden SBY memang ASEAN merupakan konsen utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada tataran regional.

Dari segi ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia khususnya pada era kepemimpinan Presiden SBY, ada beberapa kepentingan ekonomi yang tercapai, antara lain ASEAN kini menjadi salah satu kawasan yang cukup dinamis dalam menggerakkan perekonomian global yang tengah menghadapi resesi. Pada 2010, ASEAN mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5 persen jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya tumbuh 4,8 persen. Secara keseluruhan, kombinasi GDP negara - negara ASEAN mencapai US\$ 1,5 triliun yang menjadikan ASEAN sebagai salah satu area ekonomi terbesar dunia disamping China dan Jepang. Jumlah total penduduk yang mencapai 558 juta jiwa ,jumlah yang jauh lebih besar dari Amerika Serikat dan Uni Eropa sehingga menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan potensi pasar tunggal yang besar dengan tenaga kerja serta kekayaan alam yang akan menjadi basis produksi menjanjikan bagi sejumlah negara (Sinulingga, 2009). Kenyataan tersebut menyatakan bahwa betapa menguntungkannya ASEAN dalam kemajuan ekonomi negara – negara anggotanya termasuk Indonesia terkait kepentingan nasionalnya. ASEAN mampu menjadi pesaing kawasan lainnya jika saja terus mengalami perkembangan ekonomi seperti itu. Dan kemajuan ini pastinya akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi dalam bidang ekonomi serta berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia nantinya.

Indonesia didalam ASEAN dapat dikatakan sebagai *“Natural Leader of ASEAN”*. Hal demikian terbukti dengan banyaknya implementasi politik luar negeri Indonesia melalui program kerja ASEAN. Indonesia mencoba membangun kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai dan mandiri tanpa harus terpengaruh ataupun menjadi kawasan pengaruh

negara – negara besar (Major Power) seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan India. Indonesia pada era kepemimpinan Presiden SBY mencoba membangun kawasan yang kuat dalam berbagai bidang dan bukan menjadi ajang perbutan pengaruh dari negara besar. Peran Indonesia sangat besar dalam menggerakkan kebangkitan ASEAN dan dengan politik luar negeri bebas aktifnya Indonesia tidak akan memihak pada satu kekuatan major power melainkan akan merangkul semua negara untuk dijadikan rekan kemitraan yang pada akhirnya akan mempermudah Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Indonesia harus bisa mempertahankan eksistensinya dalam ASEAN sebagai pemimpin yang menggerakkan ASEAN agar terus berusaha menjadi organisasi kawasan yang mandiri, memajukan ekonomi, menjaga stabilitas keamanan, serta kesejahteraan.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN juga harus sinkron ataupun tidak bertentangan dengan norma dan prinsip ASEAN. Norma dan prinsip ASEAN bersumber pada perjanjian persahabatan dan kerjasama (*treaty of amity and cooperation*) yang ditandatangani pada pertemuan puncak ASEAN pertama di Bali tahun 1976, isi dari norma dan prinsip tersebut antara lain: 1) Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah semua bangsa, 2) Setiap negara berhak memelihara keberadaannya dari campur tangan, subversi, kekerasan dari kekuatan luar, 3) Tidak mencampuri urusan dalam negeri lain, 4) Menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dengan jalan damai, 5) Menolak ancaman penggunaan kekerasan. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terkait norma dan prinsip ASEAN diatas adalah terlihat dalam beberapa contoh kasus seperti Konflik Laut China Selatan (LCS) yang melibatkan negara– negara anggota ASEAN seperti Filipina, Brunei, Vietnam serta Malaysia, dan terkait konflik etnis Rohingya di Myanmar. Posisi Indonesia di dalam konflik tersebut tidak bisa terlalu memaksakan kepentingannya sendiri

akan tetapi akan berubah pada tataran kepentingan regional khususnya keberadaan ASEAN.

Politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2012, telah bekerja untuk menciptakan suatu tatanan di kawasan Asia Tenggara dan juga dalam penguatan serta penghormatan dalam norma dan prinsip hubungan baik antar negara yang ditujukan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Contoh peran Indonesia pada masalah ini adalah ketika timbul keraguan mengenai kesamaan pandangan ASEAN terhadap Laut China Selatan , Indonesia bergerak melalui *shuttle diplomacy* selama 36 jam untuk mengkonsolidasikan posisi ASEAN sesuai *six-point principles*. Selanjutnya, diplomasi Indonesia mendorong momentum pelaksanaan secara menyeluruh *Declaration of Conduct* (DoC) termasuk di dalamnya suatu *regional code of conduct* melalui disepakatinya elemen - elemen dasar *Code of Conduct* (CoC) termaksud serta pengajuan suatu draft awal CoC. Enam prinsip utama ini merupakan buah manis *shuttle diplomacy* yang dilakukan Menlu Indonesia Marty M. Natalegawa atas arahan Presiden SBY ke Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Singapura. Peran sentral Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan tercapainya posisi bersama ASEAN ini. *ASEAN's Six-Point Principles on the South China Sea* secara garis besar menjelaskan bahwa perserikatan negara Asia Tenggara tersebut mengafirmasi ulang deklarasi sikap atau *declaration of conduct* (DoC) terhadap isu Laut China Selatan. Selain itu, sepuluh negara ASEAN juga mengafirmasi ulang pedoman deklarasi sikap itu. Poin berikutnya yang dinyatakan adalah urgensi penyelesaian pembahasan *code of conduct* (CoC) dan menghargai hukum internasional yang berlaku, yakni *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Selanjutnya, Menlu ASEAN sepakat melarang penggunaan kekerasan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara damai sesuai UNCLOS 1982. Berikut adalah isi dari six – point principles on South China Sea : *ASEAN Foreign Ministers reiterate and reaffirm the commitment of ASEAN Member States*

to: 1) The full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2002); 2) The Guidelines for the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2011); 3) The early conclusion of a Regional Code of Conduct in the South China Sea; 4) The full respect of the universally recognized principles of International Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS); 5) The continued exercise of self-restraint and non-use of force by all parties; and 6) The peaceful resolution of disputes, in accordance with universally recognized principles of International Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Dari pernyataan diatas terlihat bagaimana peran Indonesia terhadap ASEAN terkait permasalahan konflik Laut China Selatan sangatlah besar. Presiden SBY melalui Menteri Luar Negerinya berusaha menjadi penggerak dalam penyelesaian konflik ini. Indonesia tidak ingin konflik ini merusak integrasi dari ASEAN serta mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam konflik ini akan berhadapan dengan negara China. Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif berusaha menjadi pihak yang tidak memihak , akan tetapi berusaha mendorong dan memfasilitasi penyelesaian konflik didalam suatu forum. Hal ini juga terkait kepentingan Indonesia terkait isu keamanan kawasan serta eksistensinya sebagai pemimpin ASEAN. Indonesia terus memberi perhatian terhadap masalah ini yang juga melibatkan mitra kerjanya sekaligus anggota ASEAN yang menjadi pilar utama politik luar negeri Indonesia.

Selain konflik Laut China Selatan, juga terdapat isu kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Konflik ini menimpa etnis Rohingya, dimana telah terjadi pelanggaran kemanusiaan yaitu pengusiran etnis Rohingya yang beragama muslim serta pembunuhan etnis tersebut. Sebagai negara Demokrasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Indonesia harusnya memberikan tindakan langsung

terhadap tindakan ini, begitupun ASEAN yang mawadahi kepentingan negara – negara anggotanya. Akan tetapi perlu diperhatikan mengenai norma dan prinsip ASEAN *dalam ASEAN Charter pasal 2 ayat (2)* poin e yang menyatakan bahwa sesama negara anggota tidak boleh ada saling intervensi. Tentu ini menjadi penghalang bagi ASEAN untuk menindak lanjuti kasus ini, begitupun Indonesia sebagai negara yang membawa nilai Demokrasi. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di kawasan Asia Tenggara pada akhirnya mendukung Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk melakukan pendekatan terhadap Myanmar terkait penyelesaian masalah Rohingya. Dukungan dari Indonesia sangat membantu OKI dalam melakukan pendekatan kepada Myanmar, karena Indonesia merupakan pemimpin ASEAN sekaligus memiliki diplomasi yang baik terhadap negara anggota ASEAN lainnya. Terlihat bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terkait hal kemanusiaan dan pembangunan nilai–nilai demokrasi kepada Myanmar. Tindakan Indonesia jika dikaitkan dengan kepentingannya adalah untuk meningkatkan eksistensinya sebagai negara demokrasi serta bagaimana Indonesia bisa menjadi pengaruh baru dengan membawa nilai–nilai demokrasi di kawasan Asia Tenggara.

Politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN terkait bidang sosial budaya antara lain pemberantasan narkoba, peningkatan pendidikan, serta sektor pariwisata. Akan tetapi mengingat program ASEAN mengenai free trade area, maka ASEAN akan lebih konsen kepada pemberantasan narkoba. Dibukanya pasar bebas Asia Tenggara (AFTA) tahun 2003, telah dimanfaatkan oleh pengedar narkoba untuk mengembangkan pengaruhnya, mengingat di wilayah tersebut terdapat daerah segitiga emas yaitu Laos, Myanmar dan Thailand, yang merupakan daerah penghasil dan produsen narkoba yang terbesar di Asia Tenggara. Posisi ini mengakibatkan terbukanya jalur peredaran sampai ke Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Di samping itu, kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil di negara-negara Asia Tenggara sangat menguntungkan bagi para

sindikata narkotika untuk meningkatkan peredaran dan perdagangan narkotika di kawasan ini karena di negara-negara tersebut masyarakatnya cenderung akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh pengedar untuk menjalankan bisnisnya.

Dalam pertemuan ASEAN Summit 2012 yang diselenggarakan di negara Kamboja pada tanggal 3-4 April para kepala negara anggota menyetujui untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika di antara negara-negara anggota. Persetujuan tersebut terlampir lewat sebuah deklarasi yang dirilis dengan judul "*Declaration on Drug-Free ASEAN 2015*". Sebelumnya, deklarasi bersama untuk ASEAN Bebas Narkotika sudah pernah ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada 25 Juli 1998 dan AMM ke-33 di Bangkok pada Juli 2000 lalu, guna mempercepat realisasi Bebas Narkotika ASEAN dari 2020 ke 2015 dan juga mengenai pemberantasan rencana produksi obat terlarang, perdagangan manusia, dan penggunaannya sejak 2009-2015, dan Deklarasi Bali pada Komunitas ASEAN dalam Bali *Concord III*, dan *ASEAN Security Community Blueprint* pada 2015.

Melalui deklarasi tersebut, para pemimpin negara - negara tersebut juga setuju dan siap untuk berdiskusi mengenai peredaran narkotika. Selain itu, mereka juga sepakat untuk melanjutkan deklarasi ini dengan hal - hal teknis pada tingkat kementerian untuk menghasilkan sebuah rancangan yang berhubungan dengan pemberantasan peredaran narkotika. Untuk menindaklanjuti deklarasi tersebut, maka diadakan pertemuan *Special ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters* untuk mendorong dan merealisasikan tercapainya kawasan ASEAN yang bebas narkotika tahun 2015, dihadiri oleh wakil - wakil tingkat menteri yang menangani isu narkotika dan *ASEAN Secretariat*, dan hasil pertemuannya akan ditindaklanjuti pada pertemuan *33rd ASEAN Senior Official Meeting on Drugs (ASOD)* di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 25-27 September 2012.

Pokok-pokok yang disampaikan oleh Delegasi RI dalam pertemuan tersebut adalah:

1. Indonesia menekankan agar *Special ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters* dapat memberikan dorongan kuat bagi semua negara anggota, khususnya *sectoral bodies* di bidang narkotika untuk lebih efektif dan berhasil dalam upaya mencapai *Drug Free ASEAN 2015*.
2. Pentingnya perlindungan kaum muda ASEAN terhadap bahaya narkotika melalui kerja sama nyata antara anggota ASEAN dan mitra wicara, melalui *sharing of information, joint cooperation, controlled deliveries, transfer the knowledge and alternative development and implementing comprehensive drug demand reduction*.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada era kepemimpinan Presiden SBY yang sangat memiliki peran terhadap ASEAN. ASEAN yang menjadi pilar utama kerjasama Indonesia terhadap negara – negara di kawasan Asia Tenggara. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diimplementasikan dalam bentuk hubungan luar negeri dengan organisasi regional ASEAN. Tentu segala pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diabdikan kepada kepentingan dan tujuan nasional Indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea 4. Indonesia berperan aktif dalam ASEAN dan pergerakan politik luar negeri Indonesia sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Presiden SBY yang lebih menekankan prinsip *“Thousand Friends , Zero Enemy”* , berusaha menghindari segala bentuk permusuhan antar negara dan mengajak negara – negara lainnya untuk bekerjasama dalam berbagai bidang guna mencapai kepentingan nasional Indonesia itu sendiri. Presiden SBY telah membawa Indonesia melalui politik luar negeri bebas dan aktif untuk bisa mencapai kepentingan nasional di kancah regional khususnya dalam ASEAN. Politik luar negeri Indonesia tidaklah statis akan tetapi dinamis , hal tersebut terlihat dari perkembangan kerjasama dengan ASEAN. Politik luar negeri Indonesia

tidaklah bersifat konservatif , maksudnya adalah hanya mempertahankan kerjasama yang sudah ada tanpa melakukan pengembangan lagi. Politik luar negeri pada era kepemimpinan Presiden SBY, lebih terfokus pada pemulihan nama baik Indonesia serta peningkatan peran diplomasi Indonesia di organisasi Internasional khususnya ASEAN mengenai berbagai isu - isu internasional. Konsep yang dibawa oleh Presiden SBY terkait pelaksanaan politik luar negerinya bukan lagi mengenai “mendayung diantara dua karang” oleh sebab telah runtuhnya Uni Soviet sebagai kekuatan besar dunia , dan Presiden SBY membawa konsep baru mengenai “*Navigating a turbulent ocean*” atau “mengarungi samudera yang bergolak”. Hal ini berarti Indonesia telah berada pada situasi dimana dunia mengalami banyak perubahan terkait masalah global, munculnya kekuatan – kekuatan baru dari negara lain, serta mengenai interdependensi antar negara.

I. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, berharap menciptakan politik luar negeri bebas aktif dengan melihat kondisi kekinian bangsa Indonesia itu sendiri. Terdapat 3 permasalahan pokok yang sedang dihadapi oleh Indonesia, yakni pertama, merosotnya kewibawaan negara, adalah ketika pemerintah tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warganegara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah membiarkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Kewibawaan negara juga semakin dicerai ketika negara mengikat sejumlah perjanjian internasional yang menciderai karakter dan makna kedaulatan yang lebih memberi keuntungan bagi perseorangan, kelompok maupun perusahaan multinasional ketimbang bagi kepentingan nasional.

Kedua, kelemahan sendi perekonomian bangsa, lemahnya sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mwujud (tangible) maupun bersifat non-fisik (intangible), bagi kesejahteraan rakyatnya. Ketiga, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa, politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa yang toleran, memudahkan solidaritas, dan sifat gotong royong. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam realokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan nasional.

Atas dasar itu, dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa maka, Presiden Jokowi dalam pemerintahannya mengusung visi: “Perubahan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Dengan meneguhkan kembali jalan ideologi, karena ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan TriSakti (RJPMN 2014-2019). Di mana, penjabaran TriSakti yakni: Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Hal ini menjadi landasan pokok Presiden Jokowi di dalam merumuskan kebijakan politik luar negerinya.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mandiri, dengan menyelesaikan ketiga pokok permasalahan tersebut, maka terdapat tantangan tantangan tersendiri untuk menyelesaikannya. Berikut ini, uraian mengenai substansi dari kebijakan politik luar negeri Indonesia berdasarkan tiga bidang, yakni: Memperkuat kedaulatan Politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

1. Memperkuat kedaulatan politik

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, kemandirian yang dimaksudkan, bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antar-bangsa.

Kemandirian yang demikian, adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif. Bangsa yang berdaulat dan mandiri, adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak diperlukan perkuatan kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Negara dikatakan berdaulat secara politik dan bisa menjadi negara yang mandiri, apabila dalam percaturan politik internasional, negara tersebut dapat tampil dengan percaya diri membawa kepentingan negaranya. Berdaulat dalam bidang politik yang seperti inilah yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi, dimana posisi Indonesia di dalam percaturan politik internasional, dapat tampil dengan membawa kepentingan nasional, tanpa ada himpitan dari negara lain yang berkepentingan terhadap kebutuhan pribadi negara tersebut.

Kedaulatan dalam bidang politik, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan dalam bidang politik adalah kemampuan untuk menjaga kemandirian dan mengaktualisasikan kemerdekaannya dalam seluruh aspek kehidupan. Di samping itu, kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa. Berdaulat dalam bidang politik, merupakan basis utama keberadaan negara, di mana di dalamnya

tercakup aspek-aspek hakiki kelangsungan negara: keutuhan wilayah, pengakuan internasional atas kedaulatan dan otoritas wilayah, kemandirian dalam mengatur dan menentukan kebijakan negara demi kesejahteraan masyarakat, kemampuan untuk menciptakan rasa aman bagi warga negara melalui penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, membela dan melindungi wilayah dan warga negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar, serta kebebasan dalam menentukan arah hubungan luar negeri yang mengabdikan pada kepentingan nasional yang diwujudkan melalui politik luar negeri bebas aktif.

Prinsip bebas aktif telah menjadi jiwa atau roh yang melandasi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Menurut Mohammad Hatta, prinsip bebas aktif bukanlah berarti netralitas, namun lebih menunjukkan reaksi Indonesia untuk bebas memilih atau tidak memihak kepada salah satu blok (Amerika atau Uni Soviet) di era Perang Dingin, namun tetap aktif berinteraksi dengan negara lain serta berpartisipasi dalam usaha menjaga perdamaian dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif merupakan suatu prinsip yang sifatnya reaktif yaitu prinsip yang lahir sebagai reaksi dan respons atas situasi Perang Dingin dan bukan merupakan prinsip yang sifatnya pro aktif. Politik luar negeri yang berani tampil beda ini, ternyata mampu menginspirasi negara-negara lain yang juga memiliki kecenderungan yang sama, sehingga mengerucut pada penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok. Pada tahap ini, politik luar negeri bebas aktif dapat dikatakan berhasil mencapai kepentingan nasional saat itu yaitu menunjukkan jati diri bangsa Indonesia di tengah perkembangan situasi internasional.

Dalam kebijakan pemerintahan Jokowi, terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, dapat ditekankan pada adanya kemampuan untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian wilayah NKRI. Hal ini menjadi modal dasar agar Indonesia dapat menjaga wibawanya pada dunia

internasional, sehingga tidak dilecehkan oleh negara lain. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Retno.L.P. Marsudi memaparkan mengenai politik luar negeri Indonesia untuk lima tahun ke depan pada bidang politik, dapat dilihat pada fokus utama dalam negeri yakni menjaga kemandirian dan kedaulatan RI. Sedangkan untuk luar negeri, Menlu menekankan pentingnya kerja sama maritim sebagaimana dinyatakan pada konferensi pers pertamanya di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI dalam tabloid diplomasi Kemenlu.

“Kita ingin mendorong terwujudnya poros maritim nusantara melalui pendekatan kedaulatan, keamanan, dan kemakmuran. Selain itu, kita juga ingin mengedepankan doktrin poros maritim dalam pertemuan ASEAN melalui *ASEAN Maritime Forum* dan mendorong terwujudnya konektivitas maritim, dan memfasilitasi pembangunan jalur laut serta kerja sama dengan negara-negara kepulauan dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim” (Menlu, 2014).

Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, dibutuhkan banyak investasi yang besar agar kebijakan tersebut dapat terwujud. Dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang besar, sehingga jalur perdagangan antarnegara dapat berjalan dengan baik. Sehingga Presiden harus mampu mengambil keputusan yang tepat, agar segenap *stake holders* dalam negeri dapat bersatu untuk membantu terwujudnya kebijakan tersebut. Karena, tanpa dukungan dari segenap *stake holders* sulit untuk mengaplikasikan kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai poros maritim.

Hal ini memberikan keuntungan yang lebih besar, apabila Indonesia sebagai poros maritim, karena telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Terlebih pemerintahan sebelumnya, kurang memperhatikan keadaan dari kepulauan Indonesia yang amatlah luas tersebut. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Selain itu, Jokowi juga berkomitmen pada

kedaulatan negara bangsa Indonesia dengan menekankan pada kepentingan nasional, misalnya dengan melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Hal ini merupakan salah satu upaya agar Indonesia dapat dikatakan sebagai negara berdaulat dengan adanya perlindungan yang sangat signifikan terhadap warga negara Indonesia. Karena telah kita ketahui bersama kehidupan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, mengalami tindakan yang tidak manusiawi. Sehingga hal ini membuat Jokowi untuk memerhatikan lebih mendalam terhadap nasib dari warga negara Indonesia.

Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan kedaulatan dalam bidang politik, yakni dengan melihat keadaan domestik Indonesia. Di mana, masih banyaknya tindakan korupsi yang terjadi, dan sulitnya memberantas para pelaku korupsi. Pemberantasan korupsi ini masih merupakan tantangan yang serius bagi pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, korupsi dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa.

2. Berdikari dalam bidang ekonomi

Salah satu indikator kemandirian suatu bangsa di bidang ekonomi, tercermin dari tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan, yang bersumber dari dalam negeri, yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia.

Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang

maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan ketentraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Berdikari dalam bidang ekonomi, diwujudkan dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama pembentukan produksi. Berdikari dalam bidang ekonomi yang dimaksudkan Presiden Jokowi, yakni kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rakyat, yang diartikan pada kemandirian ekonomi. Presiden Jokowi menekankan pentingnya agar Indonesia terbebas dari intervensi pihak manapun yang dapat mengancam eksistensi perekonomian rakyat, sehingga dapat mengelola sumber daya alam secara maksimal untuk kepentingan rakyat (Moerti, 2014).

Presiden Jokowi, menekankan pentingnya untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, baik yang sudah dikelola oleh pihak asing ataupun sumber daya alam yang belum terjamah oleh tangan-tangan manusia. Sehingga dengan mengolah sumber daya alam secara maksimal, maka negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya dan membuka akses pasar untuk produk-produk Indonesia, membuka pasar-pasar baru yang belum tergarap secara optimal, menarik investasi asing di sektor-sektor prioritas sambil melindungi investasi Indonesia, mendorong kerjasama strategis dan komprehensif bilateral, memanfaatkan ASEAN *Economic Community* dan melakukan kerjasama peningkatan kapasitas dan triangular. Berdikari dalam bidang ekonomi ditandai pula dengan kemampuan bangsa Indonesia untuk berinvestasi di luar negeri dengan bermitra kepada para pekerja-pekerja yang ada di daerah pertanian, perikanan, dan lainnya (Tabloid Diplomasi, 2014).

Selain itu, para diplomat untuk mampu meningkatkan diplomasi ekonomi. Kemlu akan menyiapkan *guidelines* kepada semua kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, untuk meningkatkan diplomasi ekonomi. Perlu suatu perubahan *mindset* bagi para diplomat Indonesia bahwa kita harus lebih aktif dalam diplomasi ekonomi. Diplomat Indonesia, bahkan Dubesnya juga harus blusukan. Di sisi hubungan internasional diplomasi ekonomi internasional diarahkan untuk kepentingan nasional, yang dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Sementara itu, keikutsertaan dan partisipasi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas maupun kemitraan ekonomi, akan dilakukan secara selektif, yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada pertemuan KTT ASEAN di Myanmar, Presiden Jokowi membawa kepentingan nasional Indonesia, yakni Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara yang mengikuti pertemuan tersebut, untuk melibatkan secara aktif UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dalam kerjasama ekonomi. Lalu, tindak lanjut dari KTT tersebut, Presiden Jokowi mengharapkan kementerian terkait senantiasa mempromosikan keterlibatan UKM, mengingat mayoritas usaha di tanah air masuk dalam kategori UKM. Selain itu, Jokowi juga melihat adanya potensi nasional yang dimiliki oleh Indonesia yang dapat dikembangkan dalam pembangunan ekonomi Indonesia kedepannya. Oleh karena itu, Indonesia pada pemerintahan Jokowi, pembangunan ekonomi bertumpu pada pemanfaatan potensi nasional.

Mencermati dinamika dunia internasional dewasa ini, tampaknya sudah waktunya politik luar negeri Indonesia mengedepankan pada pencapaian yang nyata berdasarkan pendekatan yang realistis, rasional, dan pragmatis. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia

mengedapankan ekonomi kerakyatan, yakni kebijakan yang berorientasi pada sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat.

Hal ini diterjemahkan dalam bentuk diplomasi ekonomi yang dapat memberikan langsung manfaat bagi rakyat. Diplomasi semacam ini harus mempromosikan hubungan ekonomi perdagangan dan investasi, yang menyentuh langsung potensi rakyat dan yang membuka lapangan kerja, serta menarik investasi asing dan mengarahkannya untuk sektor pertanian, perikanan dan peternakan serta menggenjot ekspor produk yang dihasilkan kalangan bawah. Hal ini dapat menjadi rujukan sebagai model diplomasi ekonomi yang membumi dan memberi manfaat bagi rakyat.

Pada dasarnya negara besar, yakni negara yang kuat dalam ekonominya. Tidak ada manfaatnya berpartisipasi dalam hingar-bingar hubungan internasional kalau kenyataannya tidak kuat secara ekonomi, apalagi menjadi negara yang bergantung. Dengan pemahaman ini, Presiden Jokowi memusatkan perhatian pada diplomasi ekonomi. Presiden Jokowi menyatakan bahwa, diplomasi ekonomi perlu terus dibangun dalam rangka menciptakan peluang pasar di luar negeri sehingga produk-produk dalam negeri akan bisa bersaing di pasar luar negeri. Presiden lebih lanjut menyatakan bahwa para duta besar Indonesia yang berada di luar negeri dilengkapi dengan kemampuan melakukan diplomasi ekonomi dan tidak hanya masalah politik saja karena diplomasi ekonomi sangat penting untuk membuka peluang pasar di luar negeri. Presiden mengharapkan agar para diplomat melakukan 90% diplomasi ekonomi serta dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan di bidang ini. Apabila peluang pasar sudah terbuka, maka mudah untuk menggerakkan rakyat dalam berbagai industri untuk memenuhi pasar tersebut.

Konsekuensinya, jika selama ini hiruk pikuk politik luar negeri lebih banyak dilakukan dalam kerangka multilateral (PBB, GNB, OKI, APEC, dan ASEAN), kini sudah waktunya lebih diarahkan pada diplomasi

bilateral, yang dapat memberikan *impact* terhadap kemajuan perekonomian Indonesia. Henry Kissinger mengatakan, “*No foreign policy- no matter how ingenious- has any chance of success if it is born in the minds of a few and carried in hearts of none.*” Diplomasi bilateral harus menjadi ujung tombak politik luar negeri.

Diplomasi bilateral jelas lebih mencapai hasil yang lebih nyata, sementara multilateralism lebih merupakan upaya melukis langit atau mengukir laut. Multilateralisme masih tetap diperlukan untuk berdasarkan asas prioritas. Artinya, tidak mesti aktif di semua organisasi internasional, kecuali jika mendapatkan sesuatu yang nyata, terutama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi melihat perlu adanya suatu pemetaan terhadap negara-negara yang menjadi prioritas berdasarkan keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh.

Jokowi berkomitmen untuk memajukan kerjasama ASEAN, termasuk dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Presiden menegaskan, Indonesia tidak akan dibiarkan menjadi pasar semata. Indonesia juga harus menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global, sebagaimana dinyatakan pada KTT ASEAN pertama Presiden Jokowi, “Indonesia di bawah pemerintahan saya terbuka untuk bisnis. Namun, Indonesia seperti negara berdaulat manapun, harus memastikan kepentingan nasionalnya tidak dirugikan”. Tegas Jokowi ketika berbicara pada di KTT ASEAN Myanmar (Buletin Masyarakat Asean, 2014).

Tantangan yang dihadapi Indonesia apabila ingin menjadi negara yang mandiri dalam bidang ekonomi, apabila dilihat dari sektor domestik, yakni pada pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi tinggi dapat tercapai apabila didukung dengan reformasi yang menyeluruh. Maksudnya, tantangan yang paling nyata terlihat yakni ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kemajuan ekonomi Indonesia sangat terbatas dan merupakan hambatan yang paling

utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik.

3. Berkepribadian dalam kebudayaan

Kepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia. Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya.

Terkait pilar budaya, Presiden Jokowi akan menguatkan *soft power* Indonesia melalui kerjasama budaya, moderasi, demokrasi, pendidikan serta riset dan teknologi. Kepribadian dalam kebudayaan, dilakukan dengan menerapkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat.

Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman/pluralisme. Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai negara pejuang, memudahkan solidaritas sosial, dan meminggirkan kebudayaan lokal. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman yang menjadi karakter Indonesia sebagai negara majemuk. Kemajemukan adalah fakta sosial yang harus diterima oleh

seluruh komponen masyarakat, sekaligus dijadikan modal dasar bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang kuat dan unggul di tengah pergaulan antarbangsa di dunia.

Untuk itu, menguatkan nilai-nilai Pancasila menjadi basis dalam ikatan kehidupan bermasyarakat Indonesia, memantapkan kohesi sosial dan solidaritas sosial, dan meneguhkan rasa cinta tanah air untuk merekatkan persatuan dan kesatuan. Dengan menguatkan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sudah lama hilang. Salah satu nilai luhur yang menjadi identitas budaya bangsa Indonesia adalah gotong royong, yang mencerminkan kesetiakawanan dan kekeluargaan, ditandai oleh kesediaan untuk saling berbagi, tolong menolong, dan berpartisipasi yang dilandasi semangat persaudaraan yang tulus dalam mengatasi suatu masalah, atau melaksanakan suatu hajat dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, globalisasi yang membawa nilai-nilai budaya baru cenderung melemahkan gotong royong, tergantikan oleh sikap individualis dan konsumtif terutama di dalam kalangan masyarakat perkotaan. Untuk itu, penguatan nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam kehidupan anak bangsa Indonesia dan meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia agar arus globalisasi tidak sampai mengikis nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang menjadi jati diri bangsa. Bahkan gotong royong harus dapat ditransformasikan ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas nasional.

Kegagalan bangsa Indonesia dalam mengelola persilangan nilai-nilai budaya lokal dan budaya global dapat menjadi ancaman dalam membangun karakter bangsa yang kokoh. Bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh apabila keberagaman itu tetap dipertahankan dan tidak menimbulkan pertentangan diantara warga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, budaya dapat dijadikan sebagai instrument diplomasi Indonesia pada politik luar negeri, untuk mempromosikan budaya

Indonesia lebih luas di negara-negara lainnya yang dapat mempertahankan karakter bangsa Indonesia yang kokoh. Promosi nilai budaya ini untuk menjaga keutuhan bangsa dan wilayah, serta Indonesia sebagai negara yang berbudaya dapat dijadikan sebagai cirri diplomasi dan politik luar negeri yang berkepribadian. Selain itu, berkepribadian dalam kebudayaan dapat dilihat pada peningkatan kualitas pendidikan, agar masyarakat Indonesia dapat berkepribadian berdasar pada budaya Indonesia sebagai masyarakat pejuang.

Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan berkepribadian dalam kebudayaan yakni, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kualitas tingkat pendidikan bangsa Indonesia yang masih terjadi kesenjangan partisipasi pendidikan, di mana masih ada segelintir masyarakat Indonesia yang belum mampu untuk bersekolah. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya westernisasi, sehingga nilai-nilai budaya bangsa Indonesia semakin tersingkirkan.

BAB 2

KERJASAMA INDONESIA DAN ASEAN

Strategi politik luar negeri Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional dapat dilihat dari keanggotaan Indonesia dalam ASEAN. Sejak didirikannya, ASEAN menjadi sebuah *cornerstone* bagi politik luar negeri Indonesia, di mana di dalam ASEAN terdapat beberapa hal atau aturan prinsipil, yakni tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, prosedur pengambilan keputusan yang berdasarkan konsensus bersama, serta ASEAN sebagai lambang dan wadah integrasi regional (Anwar, 2010). Melalui ASEAN sangat mungkin Indonesia dapat memainkan peran pemimpin di wilayah Asia Tenggara karena Indonesia merupakan negara terbesar dalam asosiasi tersebut (Suryadinata, 1998). Aktifnya Indonesia dalam ASEAN menjadi bukti bahwa Indonesia mencoba untuk eksis dan menjaga hubungan baik dengan negara sekitarnya. Salah satu tujuan terbentuknya ASEAN adalah menciptakan stabilitas regional dan membangun pilar-pilar kerjasama antar bangsa sekawasan untuk kemakmuran rakyatnya (Bhakti, 1997). Dengan terciptanya hubungan baik antar negara ASEAN dalam bentuk kerjasama dalam berbagai aspek akan menciptakan stabilitas karena masing-masing negara saling membutuhkan satu sama lain. Kemandirian regional di Asia Tenggara tanpa campur tangan asing juga menjadi keinginan Indonesia (Bhakti, 1997). Campur tangan asing yang dimaksud oleh Bhakti adalah negara-negara non-ASEAN, karena bagaimanapun bila suatu kawasan dapat mandiri dalam membangun perekonomiannya maka tidak diperlukan campur tangan dari pihak luar. Demi mewujudkan keinginan tersebut, Indonesia melakukan beberapa strategi. Menurut Suryadinata (1998), selain menjadi pemrakarsa terbentuknya ASEAN, Indonesia juga

berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara Asia Tenggara, hal ini terbukti dengan berbagai macam kerjasama ekonomi yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Perjanjian Bilateral maupun multilateral dengan negara-negara ASEAN juga menjadi salah satu upaya Indonesia untuk mewujudkan stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara. Pentingnya ASEAN juga diungkapkan oleh Marty Natalegawa, mantan menteri luar negeri Indonesia di era SBY, dalam pidatonya di CSAP General Conference yang ketujuh mengatakan bahwa keterikatan Indonesia dalam ASEAN bukan lah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan (Anwar, 2010). Selain itu, tergabungnya Indonesia dalam Pasukan Perdamaian PBB ketika terjadi perang di Kamboja dan Vietnam juga merupakan salah satu bentuk upaya Indonesia untuk menjaga stabilitas regional.

ASEAN merupakan fondasi politik luar negeri Indonesia yang penting bagi terciptanya stabilitas dan keamanan Indonesia. Dengan eksistensi ASEAN, maka negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi anggotanya, termasuk Indonesia mampu berkembang tanpa campur tangan kekuatan-kekuatan besar di luar kawasan. Bhakti (1996) menyebutkan sejumlah kepentingan Indonesia dalam ASEAN, yakni (1) peningkatan citra baik Indonesia di mata internasional, yang dapat diwujudkan dengan keaktifan Indonesia dalam menciptakan stabilitas regional Asia Tenggara; (2) penciptaan keharmonisan regional Asia Tenggara, yang berarti penting bagi pencegahan berbagai perang besar diantara negara-negara Asia Tenggara. ASEAN mampu menjadi sarana untuk meningkatkan rasa saling percaya dan menjadi bentuk diplomasi preventif bagi negara-negara yang menjadi anggota ASEAN; (3) pencegahan masuknya serangan dan subversi dari luar, yang dimaksud ialah, dengan adanya ASEAN dan terciptanya hubungan baik negara-negara Asia Tenggara, maka Indonesia dapat terhindar dari serangan asing dari utara; fungsi ASEAN sebagai penjaga stabilitas keamanan dengan demikian juga diperhitungkan sebagai sumbangsih yang berarti

bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan yang memiliki kepentingan yang sama; (4) kebutuhan Indonesia akan adanya alat tawar menawar internasional, yang merujuk pada kepentingan Indonesia untuk berhubungan dengan kekuatan-kekuatan luar; dan yang terakhir (5) peningkatan bobot internasional Indonesia dalam diplomasi internasional baik dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Suryadinata (1998) menambahkan pula bahwa kepentingan Indonesia untuk memerangi paham komunis juga mampu diakomodasi oleh terbentuknya kerjasama dengan negara Asia Tenggara, khususnya dalam ASEAN. Namun, kepentingan kerjasama antar negara di Asia Tenggara tidak telak mengesampingkan kepentingan nasional utama Indonesia. Kasus sengketa wilayah Sipadan-Ligitan antara Indonesia-Malaysia tetap diperjuangkan Indonesia dalam mahkamah internasional walaupun pada akhirnya Indonesia harus mengalah atas kemenangan Malaysia.

A. Hubungan Indonesia-Malaysia

Dalam lingkungan regional Asia Tenggara, tentu saja terdapat dinamika hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti hubungan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Brunei Darussalam. Hubungan Indonesia dengan Malaysia dapat digambarkan rumit, dan Indonesia sendiri memiliki kecenderungan bertindak sebagai saudara tua dan menginginkan diperlakukan seperti itu (Suryadinata, 1998). Ketika era kepemimpinan Soekarno di Indonesia, hubungan Indonesia dengan Malaysia tidak dapat dikatakan baik, dibuktikan dengan adanya politik konfrontasi Soekarno kepada Malaysia, yang dikenal dengan Ganyang Malaysia. Hal tersebut tidak lain dikarenakan sikap Soekarno yang sangat anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Namun, sebelum adanya politik konfrontasi terhadap Malaysia tersebut telah terbentuk suatu organisasi antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, atau yang disebut sebagai Maphilindo. Organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah organisasi embrio yang

ditujukan untuk memfasilitasi hubungan antara negara-negara melayu tersebut. Namun pada perkembangannya Maphilindo ditinggalkan ketika Malaysia terbentuk dan Jakarta memulai konfrontasi dengan Kuala Lumpur (Suryadinata, 1998).

Setelah Soeharto memegang kekuasaan dan konfrontasi dengan Malaysia berakhir, hubungan sosial-budaya antara Indonesia dan Malaysia dipulihkan kembali (Suryadinata, 1998). Sebagai contoh banyak guru dan dosen Indonesia yang dikirim ke Malaysia untuk mengajar di sekolah-sekolah Melayu, bahasa Melayu dan Indonesia disatukan oleh suatu sistem ejaan yang sama pada tahun 1972, meskipun tetap terdapat perbedaan dalam pengucapan, kemudian juga terdapat latihan militer bersama dalam rangka untuk menghancurkan kegiatan komunis di Sabah dan Sarawak, serta terdapat penandatanganan perjanjian atas Selat Malaka antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, di mana selat tersebut dianggap sebagai bagian dari jalan air dalam negeri masing-masing negara tersebut (Suryadinata, 1998). Selain itu, persepsi Indonesia dengan Malaysia atas ancaman asing hampir serupa (Suryadinata, 1998: 89). Khususnya mengenai ancaman komunisme. Untuk mengatasi berbagai ancaman komunisme, Indonesia dan Malaysia melakukan berbagai kerjasama. Sebagai contoh terdapat pertemuan ASEAN pada tahun 1976 sebagai reaksi dari adanya tiga negara Indocina yang menjadi komunis, dan pertemuan ASEAN tersebut menghasilkan Deklarasi Bali. Kerjasama dalam menghancurkan komunis juga terlihat pada usaha Indonesia dengan Malaysia dalam menghadapi masalah di Vietnam. Pada tahun 1980, Soeharto dengan Perdana Menteri Malaysia Hussein Onn bertemu dan menghasilkan Doktrin Kuantan (Suryadinata, 1998). Doktrin tersebut menganggap bahwa Vietnam yang berada di bawah tekanan China kemudian akan mencari bantuan ke Uni Soviet, di mana kemudian Uni Soviet dikhawatirkan akan membahayakan keamanan regional Asia Tenggara. Di sini kemudian ASEAN harus berperan dalam membantu Vietnam, sehingga dengan adanya bantuan dari ASEAN

diharapkan Vietnam akan menarik diri dari Uni Soviet. Kerjasama antara Jakarta dan Kuala Lumpur untuk menghadapi pemberontakan komunis berkembang mencakup area lain, termasuk pertukaran intelijen, latihan bersama, dan pertukaran perwira untuk akademi militer (Jusuf Wanandi, 1988 dalam Suryadinata, 1988).

Memudarnya ancaman komunis serta berakhirnya Perang Dingin kemudian tidak membuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia semakin baik. Hubungan Indonesia-Malaysia mulai bermasalah lagi, dibuktikan dengan lima peristiwa yang terjadi di tahun 1990-an (Suryadinata, 1998). Pertama yakni tawaran Jakarta kepada Singapura atas fasilitas latihan militer, yang kemudian membuat Malaysia curiga bahwa kerjasama tersebut sebagai ancaman keamanan terhadap Malaysia. Kedua adalah hukuman gantung Basrie Masse, yakni orang Indonesia yang berada di Sabah, yang tersangkut kasus perdagangan obat bius. Peristiwa ketiga yaitu pendatang ilegal Indonesia ke Malaysia yang meresahkan masyarakat Malaysia, karena memperburuk tingkat pengangguran, terdapat penyebaran penyakit yang dibawa imigran ilegal Indonesia, serta tingkat kriminalitas yang semakin tinggi (Graeme Hugo, 1994 dalam Suryadinata, 1998). Peristiwa keempat adalah adanya sengketa antara Indonesia dengan Malaysia yang menyangkut pulau Sipadan dan Ligitan. Kelima yaitu berkaitan dengan usulan Perdana Menteri Mahathir soal pengelompokan Ekonomi Asia Timur (EAEG), yang pada penerapannya akan mengeluarkan Amerika dalam pengelompokan EAEG ini, dan Indonesia sendiri keberatan akan usulan Malaysia tersebut, dikarenakan Indonesia masih memiliki kepentingan dengan Amerika, terutama mengenai investasi asing. Selain itu, terdapat masalah-masalah bilateral lain antara Indonesia dan Malaysia, antara lain: penentuan perbatasan bersama di Kalimantan, pengakuan yang tumpang tindih atas dua pulau kecil di Laut China Selatan, serta masalah hak-hak penangkapan ikan bagi Indonesia (Suryadinata, 1998). Berbagai contoh masalah tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat jurang

komunikasi antara dua negara. Masing-masing negara tampaknya menganggap bahwa semuanya memang mesti begitu karena keduanya, baik Melayu Malaysia, maupun pribumi Indonesia, berasal dari budaya Melayu dan keturunan etnis yang sama (Suryadinata, 1998).

Sepanjang 2009 hingga 2010, setidaknya ada tiga isu besar yang layak diangkat. Yaitu menyangkut klaim kebudayaan, hubungan warga kedua negara dan kasus TKI, serta persoalan sengketa batas wilayah. Pertama, persoalan klaim kebudayaan. Beberapa persoalan memang muncul sejak beberapa tahun lalu. Namun, isu tersebut cenderung muncul terus-menerus. Karena itu, persoalan tersebut menghiasi sebagian besar daftar permasalahan kedua negara sepanjang tahun ini, seperti belakangan ini gencar disinggung oleh klaim budaya melalui propaganda pariwisata Malaysia yang mana Malaysia mengecam tari pendet, tari tradisional daerah Bali dan reog ponorogo sebagai budaya asli negaranya yang kemudian menyulut permasalahan kedua negara. Kedua, hubungan warga kedua negara dan kasus TKI. Kedua hal tersebut merupakan persoalan yang akan senantiasa muncul dalam hubungan kedua negara. Jika melihat komposisi masyarakat dan pekerja Indonesia di Malaysia yang mencapai 2 juta orang, wajar akan muncul beragam persoalan. Terutama mengenai sikap Malaysia sebagai tuan rumah maupun perilaku warga dan pekerja Indonesia sebagai pendatang. TKI mendominasi 62,8 persen di antara keseluruhan pekerja asing di Malaysia. Karena posisinya itu, setiap kasus yang berkenaan dengan TKI menjadi sangat sensitif, dan kerap menyulut gesekan dan konflik antar kedua negara. Ketiga, mengenai sengketa wilayah. Persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun ini kembali menghangat seiring ketegangan yang berlaku di Blok Ambalat. Pemicunya adalah insiden yang melibatkan patroli tentara laut kedua negara. Ketegangan politik dan militer karena Blok Ambalat ini berkembang dan meluas menjadi isu nasionalisme, ditambah dengan insiden di seputar perairan Pulau Bintan pada tanggal 13 Agustus 2010 yang lalu yang kemudian insiden ini menjadikan perhatian yang luas dari

kalangan masyarakat Indonesia, dimana masyarakat menanggapi malaysia setidaknya telah melecehkan dan menginjak-injak harga diri bangsa indonesia di mata internasional. Dalam merespons tiga isu besar tersebut, terdapat beberapa pola yang muncul di level akar rumput. Di Indonesia, muncul demonstrasi-demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Bahkan, tingkat pendidikan terkena imbas dengan sentimen pembekuan kerja sama kedua negara oleh beberapa universitas di Indonesia.

Dalam hal ini, Presiden Yudhoyono memaparkan sejumlah pertimbangan mengapa Indonesia perlu mengedepankan diplomasi mengatasi pergesekan dengan Malaysia. Dia mengingatkan hubungan kedua negara sudah terbina sejak lama, dan kerugian besar turut diderita rakyat Indonesia bila gesekan itu dibiarkan berkembang menjadi kekerasan. Pertama, Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan sejarah, budaya dan kekerabatan sangat erat dan mungkin paling erat dibanding negara-negara lain, serta sudah terjalin ratusan tahun. Kedua, hubungan Indonesia dan Malaysia adalah pilar penting dalam keluarga besar ASEAN. ASEAN bisa tumbuh pesat selama empat dekade terakhir ini, antara lain karena kokohnya pondasi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Ketiga, yang tak kalah penting, ada sekitar dua juta warga Indonesia yang bekerja di Malaysia – di perusahaan, di kantor, di perkebunan, dan di rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia – Malaysia sungguh kuat

B. Hubungan Indonesia-Singapura

Selanjutnya yakni penjelasan tentang bagaimana hubungan Indonesia dengan Singapura. Hubungan Indonesia dengan Singapura selama era Soekarno tidak erat (Suryadinata, 1998). Pihak Jakarta memandang Singapura sebagai suatu tempat di mana kekuatan-kekuatan asing dan para pemberontak Indonesia memanfaatkannya sebagai batu loncatan. Selama konfrontasi dengan Malaysia, Singapura, sebagai

bagian integral dari Malaysia, di bawah serangan langsung. Pasukan rahasia Indonesia dikirim ke Singapura untuk melakukan kegiatan subversif. Kemudian pada tahun 1965, Singapura meninggalkan Federasi Malaysia dan menjadi merdeka. Singapura kemudian juga menormalisasikan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Namun, hubungan Indonesia-Singapura kembali memanas pada tahun 1968 ketika dua marinir Indonesia divonis mati (Suryadinata, 1998). Vonis mati tersebut dilandaskan pada alasan dua marinir yang dikirim oleh pemerintah Soekarno selama periode konfrontasi telah menanam sebuah bom di *McDonald House of Orchard Road Bom*, yang kemudian membunuh beberapa orang, dan melukai banyak orang di wilayah tersebut. Hukuman mati bagi dua marinir Indonesia di Singapura tersebut juga mendatangkan reaksi dari Indonesia yang tidak bersahabat. Banyak jenderal Indonesia yang ingin menyerang Singapura. Tapi di bawah kepemimpinan Soeharto yang menaruh perhatian rehabilitasi ekonomi dan pembangunan ekonomi, menolak untuk melakukan tindakan-tindakan drastis pada Singapura (Suryadinata, 1998). Dari sini kemudian terlihat adanya titik terang hubungan antara Indonesia-Singapura. Setelah itu dibutuhkan waktu lima tahun bagi Singapura untuk memperbaiki hubungannya dengan Indonesia.

Perbaikan hubungan antara Indonesia-Singapura dibuktikan dengan adanya kunjungan Perdana Menteri Lee Kuan Yew pada tahun 1973 ke Indonesia atas undangan yang dikirim oleh Indonesia sebelumnya. Kunjungan tersebut selanjutnya di balas oleh Presiden Soeharto. Dengan adanya kunjungan-kunjungan tersebut, Singapura memberikan informasi perdagangan bilateral yang berhubungan dengan dua negara kepada para pemimpin tinggi Indonesia (Suryadinata, 1998). Singapura juga memberikan dukungannya kepada Indonesia di PBB pada tahun 1977 atas permasalahan Timor-Timur, meskipun sebelumnya Singapura tidak begitu mendukung Indonesia dalam masalah Timor Timur ini. Hubungan yang berangsur baik antara Indonesia-Singapura kemudian juga

menghasilkan banyak kerjasama di antara keduanya, antara lain: pada bulan Januari 1989 suatu Nota Kerjasama (MOU) ditandatangani yang memberikan izin kepada Singapura untuk melatih pasukannya di Indonesia, hal ini dikarenakan kebutuhan Singapura akan wilayah untuk melatih pasukan militernya (Anwar, 2010), dan sebagai imbalannya militer Indonesia akan memberikan akses ke teknologi militer Singapura, juga pada Januari 1990 suatu kesepakatan ditandatangani antara Indonesia-Singapura dalam pengembangan Kawasan Industri Batam, yang mana selanjutnya proyek Batam ini diperluas sebagai suatu Pertumbuhan Segitiga untuk memasukkan Riau (termasuk Batam), Singapura dan Johor (Malaysia), serta di tahun 1994 Jakarta dan Singapura menandatangani Persetujuan Kerja sama Pariwisata dan Persetujuan Pelayanan Udara, yang memungkinkan kedua negara mengambil keuntungan dari meledaknya industri pariwisata (Suryadinata, 1998). Dengan berbagai kerjasama tersebut masing-masing negara, baik Indonesia maupun Singapura terlihat responsif terhadap kebutuhan masing-masing, yang kemudian menghasilkan suatu hubungan keamanan dan ekonomi yang lebih dekat (Suryadinata, 1998).

Dalam perdagangan, hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura membentuk kawasan Segitiga Emas yang terkenal dengan nama Sijori (Singapura, Johor, dan Riau). Kerjasama yang dibentuk oleh Indonesia pada pemerintahan Presiden SBY dengan Singapura bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateralnya, pemerintah mengadakan kerjasama dalam bidang pertahanan perjanjian ekstradisi, dan perjanjian kontrak terorisme, perjanjian tersebut di bicarakan pada tahun 2006 dimana Presiden SBY berkunjung ke Singapura dan membahas perjanjian tersebut.

C. Hubungan Indonesia-Filipina

Selanjutnya adalah penjelasan mengenai hubungan Indonesia dengan Filipina. Hubungan antara Indonesia dan Filipina pada awalnya

dapat dilihat dari adanya organisasi Maphilindo. Namun organisasi tersebut berumur pendek, dikarenakan terdapat masalah antar tiga negara yang terlibat, yakni perselisihan antara Manila dan Kuala Lumpur atas Sabah, serta terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Setelah Soeharto berkuasa, hubungan Indonesia dengan Filipina kembali normal (Suryadinata, 1998). Namun Manila dan Kuala Lumpur masih tetap dalam perselisihan atas Sabah. Permasalahan Kuala Lumpur dan Manila diperburuk dengan adanya dukungan Malaysia atas pemberontakan Islam (Moro) di bagian selatan Filipina. Pemberontakan Islam (Moro) tersebut menjadi permasalahan yang sangat penting bagi Filipina. Sehingga untuk mengatasinya Marcos, presiden Filipina pada saat itu meminta bantuan kepada Soeharto (Yoga Sugama, 1990 dalam Suryadinata, 1998). Di sini kemudian terlihat bagaimana hubungan antara Indonesia-Filiphina mulai terjalin. Soeharto kemudian mengajukan empat usulan untuk memecahkan masalah Moro, yakni: pertama, ada jaminan kemerdekaan beragama dan masyarakat Islam di bagian selatan Filipina diberikan perlindungan; kedua, tradisi dan budaya Islam dihargai; ketiga, tanah-tanah milik nenek moyang Moro dikembalikan; dan keempat, masyarakat Islam diberi kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Suryadinata, 1998). Tapi kemudian Marcos menolak satu usulan Soeharto yang menyatakan bahwa tanah-tanah milik nenek moyang Moro harus dikembalikan. Penolakan tersebut dilandasi bahwa tanah Moro tidak mungkin dikembalikan ke masyarakat Islam dikarenakan kebanyakan dari tanah tersebut berada di tangan masyarakat Kristen yang membentuk mayoritas masyarakat di selatan. Ini lah yang kemudian menjadi masalah Marcos, dan membuat Presiden Soeharto sedikit kecewa. Indonesia selanjutnya semakin kecewa dan tidak lagi mau membantu Filipina mengenai isu Moro dikarenakan Marcos yang pada akhirnya tidak mengikuti usulan Soeharto. Marcos mengesampingkan Indonesia dan berupaya untuk mendekati negara-negara Timur Tengah dan Organisasi

Konferensi Islam untuk menyelesaikan permasalahan Moro (Suryadinata, 1998).

Selain isu Moro, Indonesia juga membantu menyelesaikan isu Sabah yang menyangkut Filipina dengan Malaysia. Usaha dalam menyelesaikan isu Sabah oleh Indonesia dibuktikan dengan upaya Soeharto untuk meyakinkan Marcos agar melepaskan tuntutan Manila atas Sabah dalam rangka untuk mendorong solidaritas ASEAN (Suryadinata, 1998: 105). Filipina di bawah kepemimpinan Marcos kemudian menganggap Indonesia terlalu mencampuri urusan dalam negeri Filipina. Di sini lah kemudian menyebabkan friksi dalam hubungan Indonesia-Filipina, serta juga terlihat hubungan antara Soeharto dan Marcos yang tidak akrab. Namun tidak berarti tidak ada hubungan baik antara Indonesia-Filipina. Hubungan militer Indonesia dengan rezim Marcos dekat secara khusus. Bantuan militer diberikan kepada Pemerintah Marcos. Sebagai contoh Jenderal Benny Moerdani mengirim pesawat CN-212 Casa buatan Indonesia kepada Jenderal Filipina Fabian Ver (Suryadinata, 1998).

Setelah insiden pembunuhan Ninoy Aquino di Filipina, Marcos menghadapi krisis legitimasi, dan kemudian mencari bantuan ASEAN untuk melegitimasi kedudukannya dengan mengusulkan adanya pertemuan ASEAN di Manila. Namun usulan tersebut dengan tegas ditolak oleh Soeharto, dan pada akhirnya tidak terselenggara. Marcos pun akhirnya digulingkan dan digantikan oleh Corazon Aquino. Sikap Indonesia pun kemudian berubah terhadap Filipina. Soeharto percaya bahwa stabilitas Filipina penting bagi wilayah ASEAN. Atas alasan tersebut, Soeharto mendukung usulan bahwa pertemuan ASEAN akan dilaksanakan di Manila pada bulan Desember 1987 (Suryadinata, 1998). Hubungan Jakarta-Manila selama pemerintahan Aquino membaik, dibuktikan dengan adanya kunjungan Aquino ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut banyak isu yang dibahas dengan Soeharto, termasuk masalah komunisme, isu Moro, dan pembangunan ekonomi. Hubungan baik antara Indonesia-Filipina juga terus berjalan dengan baik hingga

pada pemerintahan setelah Aquino, yakni Fidel Ramos. Ditunjukkan dengan Indonesia tetap melanjutkan bantuan yang sebelumnya telah ada (Suryadinata, 1998). Isu Timor-Timur juga kemudian menjadi salah satu penanda hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Filipina. Filipina sebenarnya tidak begitu mendukung atas adanya intervensi Indonesia ke Timor-Timur. Kemudian pada tahun 1994 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Filipina menjadwalkan adanya konferensi internasional mengenai Timor-Timur. Hal tersebut otomatis membuat Indonesia bertindak untuk mencegah terselenggaranya konferensi tersebut. Namun pada kenyataannya konferensi tetap berjalan dengan memberi pengertian terhadap Indonesia, serta adanya larangan masuk terhadap delegasi non-Filipina pada konferensi tersebut (Suryadinata, 1998: 109). Solusi tersebut kemudian setidaknya dapat melegakan Indonesia.

D. Hubungan Indonesia-Thailand

Selanjutnya adalah penjelasan mengenai dinamika hubungan Indonesia dengan Thailand. Seperti juga kasus Filipina, hubungan Jakarta dengan Bangkok tidak terlalu akrab. Selama era Soekarno, karena kedekatan hubungan Thailand dengan Amerika Serikat, Jakarta tetap mengambil jarak dengan Bangkok. Tetapi ketika Soeharto duduk dalam kekuasaan dan ingin mendorong kerja sama regional, hubungan Jakarta-Bangkok membaik (Suryadinata, 1998). Pada dasarnya di sekitaran tahun 1980-an Indonesia dan Thailand memiliki persepsi yang berbeda dalam hal ancaman. Hal ini menyangkut perselisihan antara Thailand dan Vietnam. Di tahun 1980, ketika Soeharto dan Hussein Onn mencoba menarik Vietnam keluar dari Uni Soviet, Thailand tidak berkenan karena Thailand melihat bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan mengorbankan kepentingan Thailand. Dalam rangka untuk menunjukkan solidaritas ASEAN, Jakarta dengan segera meninggalkan Doktrin Kuantan dan menaruh kepentingan Thailand terdepan. Mungkin ini juga keinginan Indonesia untuk tidak terlalu mendorong Thailand lebih jauh ke dalam

jangkauan RRC (Suryadinata, 1998). Hubungan baik antara Indonesia-Thailand terlihat baik ketika Thailand di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anand Panyarachun, dibuktikan dengan penghidupan kembali ide Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA-ASEAN Free Trade Area) oleh Panyarachun, yang kemudian menerima dukungan dari Singapura dan Malaysia. Hubungan Jakarta-Bangkok lebih jauh membaik setelah Chuan Leekpai menjadi perdana menteri. Chuan mengunjungi Indonesia dan sepakat untuk mempelajari proyek Setigita Bagian Utara untuk mendorong kerjasama ekonomi Indonesia-Thailand-Malaysia (Suryadinata, 1998).

E. Hubungan Indonesia-Brunei Darussalam

Selanjutnya adalah hubungan Indonesia dengan Brunei Darussalam. Di masa Soekarno Brunei masih dalam protektorat Inggris. Di tahun 1962, ada pemberontakan di Brunei yang bertujuan menggulingkan Sultan. Hal tersebut kemudian didukung oleh pemerintahan Soekarno. Dukungan tersebut dapat dilihat dengan adanya perlindungan terhadap para pemberontak Brunei di Indonesia, setelah pemberontakan tersebut gagal. Kemudian setelah Brunei merdeka di bulan Januari 1984, Brunei langsung memutuskan untuk bergabung dalam ASEAN. Hal tersebut menunjukkan bagaimana Brunei sangat memperhatikan mengenai keamanan, serta Brunei akan lebih aman jika negaranya merupakan anggota dari organisasi regional (Suryadinata, 1998). Hubungan Indonesia-Brunei cenderung baik dan tidak berkonflik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kunjungan yang dilakukan masing-masing kepala negara, baik Soeharto yang berkunjung ke Brunei maupun Sultan yang berkunjung ke Indonesia. Brunei juga memberikan pinjaman terhadap Indonesia untuk membantu proyek-proyek di Indonesia, di mana hal tersebut menguntungkan Indonesia.

Indonesia mengekspor sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian jadi, dan kendaraan ke Brunei Darussalam. Selain itu Indonesia juga mengirimkan tenaga pengajar dan tenaga ahli lainnya ke Brunei Darussalam. Pada bulan Juli 2006, Indonesia dengan Brunei Darussalam juga membahas kerjasama dalam bidang, ESDM (energi dan sumber daya mineral). Perdana menteri Brunei Darussalam juga membahas kemungkinan kerjasama di bidang industri migas. Pada kunjungan balasan pihak Indonesia menawarkan pelatihan migas di Pusdiklat Migas Cepu. Penawaran itu ditujukan untuk negara Brunei Darussalam agar memanfaatkan pelatihan tersebut dengan 19 program pelatihan.

E. Hubungan Indonesia – Kamboja

Kerja sama antara Indonesia dengan Kamboja terlihat dengan nyata ketika Indonesia membantu menyelesaikan konflik di Kamboja. Adapun ketika itu Indonesia memprakarsai penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting, yang bertujuan untuk membahas masalah di Kamboja. Pada saat ini Indonesia mencoba merealisasikan gagasan untuk membentuk Joint Agricultural Working Group. Kamboja selama ini dianggap sebagai penghasil beras berkualitas baik dan sebagian besar di ekspor dalam bentuk gabah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berharap dengan kerja sama ini bisa meningkatkan kualitas pangan yang semakin baik.

F. Hubungan Indonesia - Laos dan Vietnam

Kerja sama Indonesia dengan Laos dan Vietnam lebih mengutamakan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemerintah Indonesia dengan Laos sepakat bekerja sama untuk meningkatkan:

- Kerjasama pengembangan kapasitas diplomat.
- Kerjasama di bidang kehutanan dalam hal teknis dan tenaga ahli.

- Indonesia membantu di Laos dalam membangun pertaniannya.

Pemerintah Indonesia dengan Vietnam sepakat bekerja sama dalam pertemuannya di Hanoi pada tahun 2007. Pembahasan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di bidang pertahanan, migas, dan pariwisata. Indonesia dan Vietnam juga merundingkan pembahasan zona ekonomi khusus dan koordinasi bersama masalah kawasan laut demi keuntungan kerja sama.

G. Hubungan Indonesia – Myanmar

Myanmar adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berideologi komunis. Negara ini sebelumnya bernama Burma. Meskipun terdapat perbedaan ideologi yang mencolok antara Indonesia dan Myanmar, namun tidak menyurutkan tekad kedua negara ini untuk tetap menggalang kerja sama yang harmonis. Setelah Myanmar masuk menjadi anggota Asean, hubungan antara Indonesia dengan Myanmar semakin erat. Adapun Indonesia dan Myanmar mengutamakan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Di sisi lain Indonesia dengan Myanmar akan membahas kerja sama dalam bidang transportasi demi memperkuat sektor ekonomi dan bisnis, terutama bidang perkeretaapian sebagai contoh kerja sama yang direncanakan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav. 2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia : ASEAN and the problems of regional order*. London and New York : Routledge
- Anwar, D. F. (1998). The Habibie Presidency. Dalam G. Forrester, *Post Suharto Indonesia : Removal or Chaos?* (hal. 4). Bathurst: Crawford House Publishing.
- Anwar, D. F. (2005). *Indonesia At Large : Collected Writings on ASEAN, Foreign Policy, Security and Democratisation*. Jakarta: The Habibie Center.
- Anwar, Dewi Fortuna. 2010. *The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy, Southeast Asian Affairs 2010*. Singapore: ISEAS.
- Anwar, Rosihan. 2007. "Pengaruh Dinamika Politik Domestik terhadap Politik Luar Negeri Di Era Soekarno", makalah disampaikan pada *Focus Discussion Group* (FGD) yang diselenggarakan oleh Tim Peneliti Polugri, P2P-LIPI, LIPI, Jakarta, 16 Mei 2007.
- Bhakti, Ikrar Nusa. 1997. *Indonesia dan Stabilitas Regional*, dalam Bhakti, Ikrar Nusa, 1997. *Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan Politik Kewilayahan LIPI. hlm. 27-51.
- Buletin Masyarakat ASEAN Edisi 6 Desember 2014 KTT ASEAN Pertama Presiden Jokowi.
- Caroline Sinulingga, 'The Economic Integration of ASEAN: An Assessment', *The President Post*, 25 Desember 2009, hlm. 3, <http://www.thepresidentpost.com/wp-content/uploads/2011/11/TPP-06th-Edition.pdf>

CSIS, Seminar “Kaji Ulang ASEAN sebagai Sokoguru Politik Luar Negeri Indonesia”,

<http://www.csis.or.id/SeminarEventDetailPast.php?id=227>.

Deutsch, Karl W. 1961. *Security Community,*” dalam James Rosenau (ed.), *International Politics and Foreign Policy*. New York : Free Press

Effendi, T. D. (t.t). *Agenda Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Pemilihan Presiden 2009*.

Jusuf, S. (1989). *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri : Sebuah Analisis Teoretis dan Uraian tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kumar, R. (1997). *Non-Alignment Policy of Indonesia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kusumaatmadja, M. (1983). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*.

Moerti, Wisnoe.2014.“Berdikari dalam Ekonomi ala Jokowi-JK”.Kamis, 22 Mei diakses pada<http://www.merdeka.com/uang/berdikari-dalam-ekonomi-ala-jokowi-jk.html>.

Paparan Menlu mengenai rencana politik luar negeri Indonesia lima tahun kedepan pada konferensi pers pertamanya di Gedung Pancasila, Rabu, 29 Oktober 2014. Dikutip pada tabloid diplomasi No.81 hal 23.

Prof. Dr. M. Habib Mustopo, D. H. (2007). *Sejarah untuk SMA Kelas 3 Program Ilmu Pengetahuan Alam*. Jakarta: Yudhistira.

Referensi

Sriyono, A. A. (2004). *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Zaman yang Berubah*. Dalam A. A. Sriyono, *Hubungan Internasional : Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia* (hal. 3). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suhanto, M. (2011). *Hakikat Politik Luar Negeri*. Kelas Politik Luar Negeri, Universitas Paramadina, Jakarta.

Suryadinata, Leo, 1998. *Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN: Stabilitas Regional dan Peran Kepemimpinan*, dalam *Politik*

Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [trans,] Jakarta, LP3ES.
hlm. 83-114.

Tabloid diplomasi, "Menlu Paparkan Rencana Politik Luar Negeri Indonesia Lima Tahun Ke depan". No.81 Edisi 15 Oktober- 14 November 2014.

Visi, misi, dan program aksi Jokowi-JK. 2014. "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. diunduh pada kpu.go.id.

Wuryandari, G. (2008). *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*.Jogjakarta: Pustaka Pelajar